

PERUBAHAN
RENSTRA
(RENCANA STRATEGIS)
DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
2018 - 2023



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kita panjatkan ke-hadirat Allah SWT, dengan atas berkah dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2018-2023.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung (DKPP) sebagai lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota Bandung yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. DKPP menyelenggarakan urusan wajib pangan dan urusan pilihan pertanian dan perikanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah diamanatkan dalam peraturan perundangan daerah. Untuk menguatkan pelaksanaan tupoksi tersebut, disusunlah Renstra DKPP Tahun 2021- 2023 sebagai pedoman perencanaan berjangka lima tahunan.

Sejalan dengan adanya perubahan peraturan dan kebijakan, dilakukan juga perubahan terhadap dokumen Renstra menjadi Renstra Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung Tahun 2018-2023

Semoga Renstra Perubahan ini dapat bermanfaat untuk digunakan sebagai salah satu instrumen dalam mencapai keberhasilan kinerja DKPP khususnya dan Pemerintah Kota Bandung umumnya dalam mewujudkan Visi “Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis”.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Bandung



Ir. GIN GIN ANJAR, M.Eng
NIP. 19661209 199503 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| DAFTAR LAMPIRAN | v |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 5 |
| | |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | |
| 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | 7 |
| 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah | 10 |
| 2.1.1. Anggaran | 13 |
| 2.2.2. Pendapatan | 14 |
| 2.2.3. Aset, Sarana, dan Prasarana | 15 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung | 18 |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung | 37 |
| | |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung | 38 |
| 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..... | 39 |
| 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Renstra OPD Lingkup Pertanian Provinsi Jawa Barat | 43 |
| 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... | 45 |
| 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung..... | 49 |
| | |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH | |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung | 51 |
| 4.1.1. Tujuan | 51 |
| 4.1.2. Sasaran | 51 |
| 4.1.3. Strategi | 51 |
| 4.1.4. Kebijakan | 52 |
| | |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | |
| 5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah | 58 |
| | |
| BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SERTA PENDANAAN | 61 |
| | |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 91 |
| | |
| BAB VIII PENUTUP | 95 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|---|----|
| Tabel 2.1. | Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan | 11 |
| Tabel 2.2. | Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan | 12 |
| Tabel 2.3. | Alokasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2013 -2020 | 13 |
| Tabel 2.4. | Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2013-2020..... | 14 |
| Tabel 2.5. | Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung Sampai Dengan Tahun 2020 | 16 |
| Tabel 2.6. | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung | 19 |
| Tabel 2.7. | Perbandingan Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2014-2017 | 25 |
| Tabel 2.8. | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung | 34 |
| Tabel 2.9. | Anggaran dan Realisasi Urusan Pangan Tahun 2013-2017 | 35 |
| Tabel 2.10. | Anggaran dan Realisasi Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2013-2017 | 36 |
| Tabel 2.11. | Anggaran dan Realisasi Urusan Pertanian Tahun 2013-2017 | 36 |
| Tabel 3.1. | Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya | 44 |
| Tabel 3.2. | Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sasaran Renstra OPD Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya | 44 |
| Tabel 4.1. | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung Tahun 2018-2023 | 54 |
| Tabel 4.2. | Perubahan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung Tahun 2018 – 2023..... | 55 |
| Tabel 4.3. | Pengukuran Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung Tahun 2013-2018 | 56 |
| Tabel 5.1. | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan | 61 |
| Tabel 6.1. | Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung | 63 |
| Tabel 7.1. | Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD 2018-2023 | 92 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|---|---|
| Gambar 1.1. | Bagan Alur Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah | 2 |
|-------------|---|---|

DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|----------|---|----|
| Lampiran | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung Tahun 2018- 2023 (Sebelum Perubahan) | 96 |
|----------|---|----|

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana untuk setiap Perangkat Daerah.

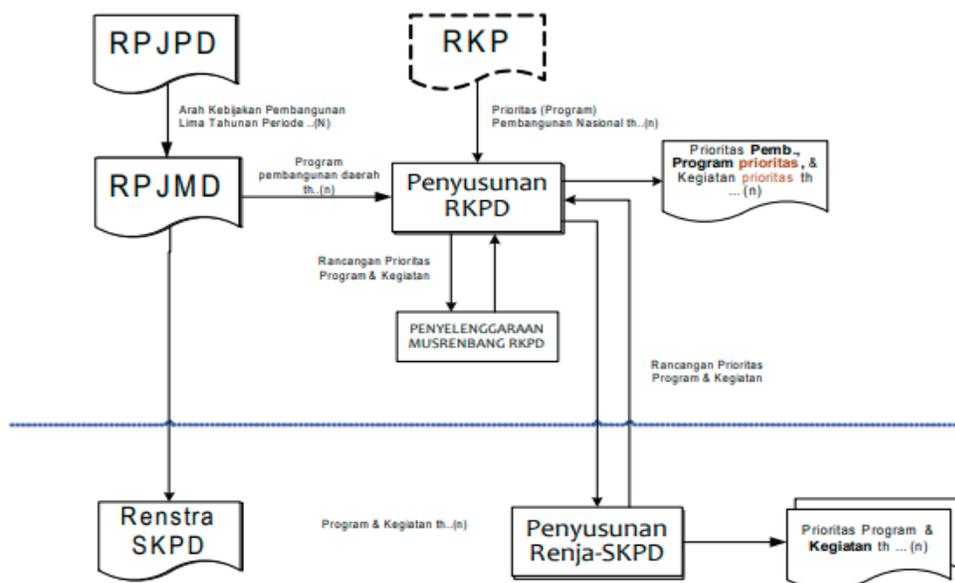
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung, telah disusun Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 yang merupakan satu bagian yang utuh dari kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Sejalan dengan adanya perubahan peraturan dan kebijakan, dilakukan perubahan terhadap dokumen Renstra menjadi Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung Tahun 2018-2023 dilatarbelakangi oleh beberapa hal. *Pertama*, tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada. *Kedua*, penyesuaian terhadap rencana pembangunan pusat dan daerah serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2018-2023). *Ketiga*, memenuhi tuntutan Visi, Misi dan Program Wali Kota Bandung sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Bandung. *Keempat*, adanya evaluasi dan perubahan RPJMD 2018-2023.

Perubahan Renstra DKPP Tahun 2018-2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yaitu Urusan Pangan dan Urusan Pemerintahan Pilihan yaitu Urusan Kelautan dan Perikanan serta Urusan Pertanian, yang disusun berpedoman kepada Perubahan RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam penyusunan Perubahan Renstra DKPP telah dilakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappelitbang dan

pemangku kepentingan. Tahapan yang dilakukan dalam penyusunan Perubahan Renstra : 1) Persiapan penyusunan; 2) Penyusunan rancangan awal; 3) Penyusunan rancangan; 4) Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah; 5) Perumusan rancangan akhir; dan 6) Penetapan.

Dalam tatakelola pembangunan daerah khususnya penyusunan dokumen perencanaan perlu adanya sinergi antara berbagai dokumen perencanaan guna menyelaraskan berbagai program pembangunan antar periode maupun antar tingkatan administrasi pemerintahan. Bagan alur hubungan antara penyusunan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah disajikan pada gambar berikut.



Gambar 1.1. Bagan Alur Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Mengingat peran dan fungsi penting Renstra Perangkat Daerah Kota Bandung baik bagi pemerintah maupun masyarakat, maka penyusunan Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan kembali secara lebih teknis pada Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung tahun 2018-2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 16);
13. Peraturan Walikota Bandung Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda 8 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 17).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra DKPP Tahun 2018-2023 yaitu memberikan penyalarsan arah dan rencana kebijakan pembangunan pangan, perikanan, dan pertanian dalam kerangka pencapaian Visi, Misi dan Program yang mengalami perubahan sejalan dengan peraturan di tingkat nasional dan regional. Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renstra DKPP Tahun 2018-2023 adalah :

- 1) Menyajikan perubahan isu strategis, tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai fokus pelayanan yang akan diwujudkan dan dikedepankan.

- 2) Merumuskan program dan kegiatan yang terarah dan tepat sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran dinas.
- 3) Menyediakan pedoman dalam Menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dinas.
- 4) Menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung 2018-2023 disusun sebagai berikut :

- **Bab 1 Pendahuluan** terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung dan sistematika penulisan;
- **Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah** memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD;
- **Bab 3 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah** memuat permasalahan-permasalahan pelayanan PD, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu-isu strategis;
- **Bab 4 Tujuan dan Sasaran** terdiri atas : Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.
- **Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan** memuat Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah. Strategi yaitu Langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan untuk mencapai

sasaran. Strategi dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan rumusan kerangka piker/kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap.

- **Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan** memuat perubahan Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan yang akan dicapai PD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

- **Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Pada bagian ini dikemukakan perubahan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

- **Bab 8 Penutup**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan yang diserahkan oleh Walikota.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 17 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, struktur organisasinya sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan ;
 3. Sub Bagian Program, Data dan Informasi.
- c. Bidang Ketersediaan Pangan, membawahkan:
 1. Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
 2. Seksi Pengembangan Pangan Lokal;
 3. Seksi Kerawanan Pangan.
- d. Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan, membawahkan:
 1. Seksi Distribusi Pangan;
 2. Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
 3. Seksi Kerjasama dan Promosi Pangan.
- e. Bidang Keamanan Pangan membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;
 2. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan;
 3. Seksi Sumberdaya Keamanan Pangan.
- f. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman;
 2. Seksi Penyuluhan;
 3. Seksi Produksi, Perlindungan Tanaman, dan Pasca Panen.

g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan:

1. Seksi Sarana, Prasarana, dan Produksi Peternakan;
2. Seksi Kesehatan Hewan;
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

h. Bidang Perikanan, membawahkan:

1. Seksi Sarana, Prasarana dan Kesehatan Perikanan;
2. Seksi Budidaya dan Produksi Perikanan;
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

i. UPTD;

j. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

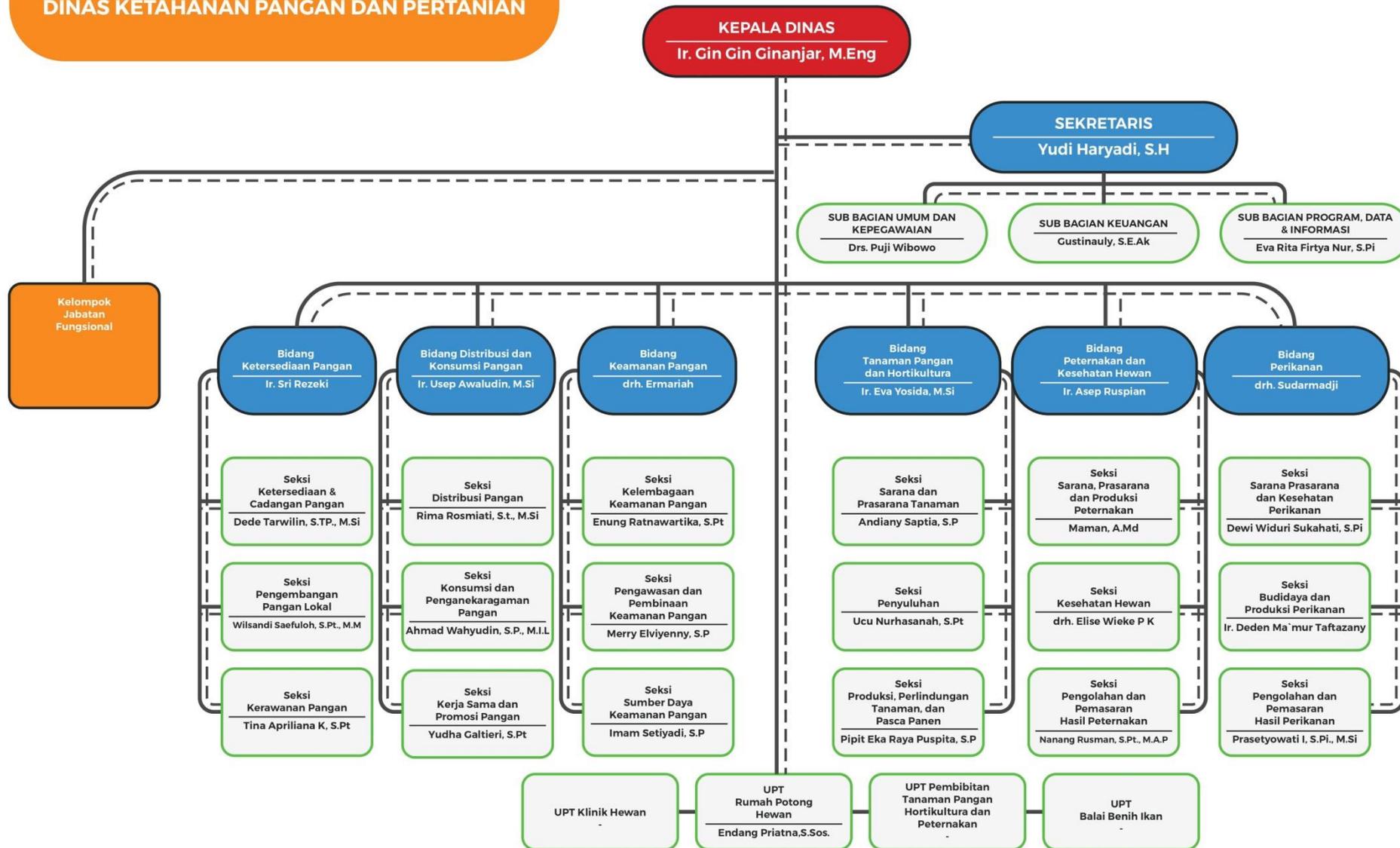
Tugas dan Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan lingkup pangan, pertanian dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan lingkup pangan pertanian dan perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pangan pertanian dan perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi lingkup pangan pertanian dan perikanan;
dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pemerintahan yang baik adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Pemerintahan yang baik digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah, yang cukup menentukan dalam meningkatkan kualitas pemerintahan, menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan di masa mendatang harus mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas.

Jumlah aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai Bulan Juli 2021 berjumlah 89 orang ASN. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung dapat dilihat pada tabel 2.1. Berdasarkan data yang ditampilkan tersebut dengan jenjang eselonering II, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung melaksanakan fungsi Pelayanan di Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Tabel 2.1.
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

| No | Uraian | Eselon I | Eselon II | Eselon III | Eselon IV | Staf | Jumlah |
|----|---|----------|-----------|------------|-----------|------|--------|
| 1 | Kepala Dinas | | 1 | | | | 1 |
| 2 | Sekretariat | | | 1 | 3 | 13 | 17 |
| 3 | Bidang ketersediaan Pangan | | | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 4 | Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan | | | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 5 | Bidang Keamanan Pangan | | | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 6 | Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura | | | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 7 | Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan | | | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 8 | Bidang Perikanan | | | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 9 | UPT Rumah Potong Hewan | | | | 2 | 3 | 5 |
| 10 | UPT Pembibitan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan | | | | 1 | 3 | 4 |
| 11 | UPT Klinik Hewan | | | | 1 | 2 | 3 |
| 12 | UPT Balai Benih Ikan | | | | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Jabatan Fungsional Tertentu | | | | - | 9 | 9 |
| | JUMLAH | | 1 | 7 | 25 | 56 | 89 |

Sumber : DKPP Kota Bandung, 2021

Dengan melaksanakan tiga urusan pemerintahan, DKPP merupakan dinas dengan tipe A yang mempunyai beban kerja cukup tinggi, sehingga memiliki jumlah karyawan yang lebih banyak daripada dinas lain. Jabatan fungsional tertentu yang ada di DKPP yaitu fungsional Analis Ketahanan Pangan Madya, Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP), dan fungsional Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Kondisi kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

| No | Uraian | S3 | S2 | S1 | D3 | SLTA | SLTP | SD | Jumlah |
|----|---|----|----|----|----|------|------|----|--------|
| 1 | Kepala Dinas | | 1 | | | | | | 1 |
| 2 | Sekretariat | 1 | 1 | 10 | | 5 | | | 17 |
| 3 | Bidang ketersediaan Pangan | | 2 | 5 | | 2 | | | 9 |
| 4 | Bidang Distribusi dan Konsumsi | | 3 | 3 | | 1 | | | 7 |
| 5 | Bidang Keamanan Pangan | | | 5 | | 2 | | | 7 |
| 6 | Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura | | 2 | 3 | | 3 | | | 8 |
| 7 | Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 8 |
| 8 | Bidang Perikanan | | 1 | 3 | | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 9 | UPT RPH | | | 2 | | 3 | | | 5 |
| 10 | UPT Pembibitan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan | | | 3 | 1 | | | | 4 |
| 11 | UPT Klinik Hewan | | 1 | 2 | | | | | 3 |
| 12 | UPT BBI | | | 1 | | 2 | | | 3 |
| 13 | Fungsional Tertentu (Penyuluh) | | | 8 | 1 | | | | 9 |
| | JUMLAH | 1 | 13 | 47 | 4 | 22 | 1 | 1 | 89 |

Sumber : DKPP Kota Bandung, 2021

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan tertinggi adalah S3 dan terendah SLTA. Tingkat pendidikan karyawan merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung secara umum.

Berdasarkan data pada Tabel 2.2 tingkat pendidikan karyawan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang paling banyak adalah pendidikan S1 sebanyak 52 orang (58,43 %), kemudian SLTA sebanyak 17 orang (19,10%), S2 tercatat sebanyak 13 (14,61%), D3 sebanyak 7 orang (7,86%) dan tingkat pendidikan S3 tercatat sebanyak 1 orang atau 1,12% dari seluruh karyawan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.

Kendala dalam ketersediaan SDM menjadi isu strategis di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung yaitu mengenai kualitas dan kuantitas pejabat fungsional. Sekalipun kebijakan internal Pemerintah Kota telah memperlihatkan keberpihakan terhadap pejabat fungsional, tetapi belum menarik minat pegawai lainnya untuk mengambil jalur karir sebagai pejabat fungsional.

2.2.1 Anggaran

Dari sisi anggaran, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran 2013-2020 beserta serapannya sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Alokasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Tahun 2013-2020

| No | Tahun Anggaran | Jumlah Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|----|----------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2013 | 21.407.292.085,58 | 20.291.958.481,00 | 94,79 |
| 2 | 2014 | 37.900.484.500,00 | 35.184.264.247,00 | 92,83 |
| 3 | 2015 | 42.829.216.614,71 | 37.442.812.089,00 | 87,42 |
| 4 | 2016 | 40.092.005.529,00 | 38.415.670.337,00 | 95,82 |
| 5 | 2017 | 42.173.802.230,00 | 39.969.225.040,00 | 94,77 |
| 6 | 2018 | 61.702.290.745,77 | 51.144.732.640,00 | 82,89 |
| 7 | 2019 | 60.781.153.185,89 | 52.471.843.344,00 | 86,33 |
| 8 | 2020 | 40.260.237.515,03 | 33.666.095.418,00 | 83,62 |

Realisasi anggaran pada tiga tahun terakhir (2018-2020) lebih rendah dari 90%. Permasalahan realisasi anggaran tidak mencapai 100% seringkali disebabkan karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan Desember sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannya. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi

anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

2.2.2 Pendapatan

Dari sisi pendapatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung mendapatkan pendapatan dari Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan (RPH), tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah pendapatan retribusi dari tahun 2013-2020 sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)
Tahun 2013-2020

| No | Tahun Anggaran | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|----|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2013 | 1.640.622.000,00 | 1.293.910.000,00 | 78,87 |
| 2 | 2014 | 1.500.000.000,00 | 1.523.570.000,00 | 101,57 |
| 3 | 2015 | 2.000.000.000,00 | 1.652.970.000,00 | 82,65 |
| 4 | 2016 | 2.062.542.000,00 | 1.415.930.000,00 | 68,65 |
| 5 | 2017 | 2.062.542.000,00 | 1.582.620.000,00 | 76,73 |
| 6 | 2018 | 1.730.000.000,00 | 1.665.860.000,00 | 96,29 |
| 7 | 2019 | 1.881.033.000,00 | 1.530.790.000,00 | 81,38 |
| 8 | 2020 | 1.316.140.000,00 | 1.229.760.000,00 | 93,44 |

Pada Tahun 2013 retribusi yang dipungut oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung hanya dari retribusi jasa usaha yaitu Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH). Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga pada tahun 2013 terjadi penurunan dalam realisasi pendapatan retribusi karena beberapa retribusi yang tadinya bisa dipungut menjadi tidak bisa dipungut setelah keluarnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Pada Tahun 2014 setelah berlakunya Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta tarif yang berlaku bagi beberapa jenis pelayanan pada Rumah Potong Hewan di Kota Bandung yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Setelah dilakukan penyesuaian besaran tarif Rumah Potong Hewan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, target dari Retribusi Rumah Potong Hewan dapat tercapai bahkan realisasinya melebihi target sebesar 101,57%. Namun demikian pada tahun 2015 kembali tidak tercapai target karena di tahun tersebut ada penambahan target sebesar Rp. 500.000.000,- dari target awal sebesar Rp. 1.500.000.000,- menjadi Rp. 2.000.000.000,- sedangkan kemampuan dalam pengumpulan penarikan retribusi maksimal tercapai sebesar Rp. 1.768.477.000,- atau hanya tercapai 88,42%. Kondisi serupa kembali terulang di tahun 2016 dimana realisasi pendapatan dari Retribusi RPH hanya tercapai sebesar 68,65%, hal ini disebabkan oleh penetapan target retribusi yang terus naik setiap tahunnya sehingga tidak sesuai dengan potensi yang sebenarnya. Disamping itu faktor lain yang mempengaruhi kecilnya persentase capaian realisasi pada retribusi RPH di tahun 2016 yaitu salah satunya penurunan jumlah angka pemotongan sapi ditahun tersebut. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, mulai tahun 2018 dilakukan penyesuaian target capaian retribusi RPH sedikit lebih turun sehingga terjadi kenaikan persentase capaian realisasi menjadi 96,29%. Pada tahun 2019 ketika awal merebaknya kasus Covid-19, realisasi kembali mengalami sedikit penurunan ke angka 81,38% hal ini disebabkan menurunnya jumlah pemotongan ternak serta pengiriman ternak dari luar daerah untuk dipotong di Kota Bandung selama masa PPKM diberlakukan. Realisasi kembali naik menjadi 93,44% pada tahun 2020 setelah masa PPKM berakhir. Berdasarkan masukan dari anggota DPRD Kota Bandung, diperlukan kajian terkait potensi retribusi RPH sehingga penentuan target dapat disesuaikan dengan potensi.

2.2.3 Aset, Sarana dan Prasarana

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung menempati kantor yang berdiri diatas lahan seluas 28.800 meter persegi milik Pemerintah Kota Bandung yang beralamat di Jl. Arjuna No. 45

Bandung. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5.
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
DKPP Kota Bandung Sampai Dengan 31 Desember 2021

| No | Nama Barang | Banyaknya | Kondisi Barang | | |
|----|--|-----------|----------------|-----|-----|
| | | | B | KB | RB |
| 1 | Kendaraan Roda 4 | 31 | 11 | 9 | 9 |
| 2 | Kendaraan Roda 2 | 79 | 35 | 27 | 17 |
| 3 | AC | 79 | 19 | 20 | 9 |
| 4 | Lemari/Rak/Buffet/Filling Cabinet/Rak Gudang | 109 | 71 | 33 | 5 |
| 5 | Brankas | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Meja (Rapat, Kerja) | 3 | 78 | 111 | 14 |
| 7 | Kursi (Lipat, Susun, Rapat, Kerja, Sofa) | 375 | 179 | 45 | 151 |
| 8 | Pesawat telepon/Faks | 15 | 12 | 2 | 2 |
| 9 | Mesin Tik | 10 | 1 | 0 | 9 |
| 10 | Komputer | 68 | 28 | 21 | 19 |
| 11 | Note Book/Laptop | 68 | 22 | 10 | 1 |
| 12 | Printer | 33 | 58 | 13 | 49 |
| 13 | Scanner | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Projector | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 15 | Camera | 30 | 16 | 12 | 29 |
| 16 | Handycam | 17 | 14 | 3 | 0 |
| 17 | Mesin Potong Rumput | 10 | 2 | 6 | 2 |
| 18 | Timbangan Obat | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Miscroscope | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Ph Meter | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | White Board | 12 | 4 | 2 | 9 |
| 22 | Pompa Air | 12 | 4 | 4 | 3 |
| 23 | Oven | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Takelt | 18 | 8 | 2 | 5 |
| 25 | Power Spayer | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | Lemari Es | 4 | 8 | 7 | 5 |
| 27 | Sound System | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | Televisi | 16 | 9 | 3 | 2 |
| 29 | Timbangan Karkas | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 30 | Stabilisator | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 31 | Mesin Absensi | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 32 | Genset | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Alat USG Pet | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Bone Crusher | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | mesin pellet pakan | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 36 | u-type mixer | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Cooling sieve | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | vertical dryer | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Mesin Pencacah (Organik) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | Handsprayer elektrik | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 41 | Mesin pengayak kompos | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Timbangan duduk | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | Centrifuge 15 x 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Minor set (alat bedah) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Scan reader - animal ID | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | Stetoscope anak | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 47 | Mesin Kombinasi Chopper dan Penepung Biji | 1 | 1 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----|--|----|----|---|---|
| 48 | Handsprayer elektrik 20 liter | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 49 | TASCO POWER SPRAYER (TASCO TF - 800) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | POWER ENGINE SPRAYER | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Chopper | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Mesin tetas 200 telur | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 53 | EC/TDS meter digital | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 54 | Mesin giling sampah sisa daging dan tulang | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 55 | PH Meter Tanah | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 56 | Alat Penyimpan Beras | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 57 | Mesin pencacah daun | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | Timbangan Hewan Digital | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Alat Operasi Set Hewan Kecil type 151770 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Oster Power Max Clipper Alat pencukur bulu hewan, 2 speed 230 V, cool blade, cool Edge | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | Alat Cukur Bulu Domba Elektrik | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 62 | Lampu Sorot | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 63 | Trolley Anasthesi | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 64 | Harddisk Seagate back up slim,HDD eksternal 1TB | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | Hoist Electric | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | Kandang Kucing/ Anjing | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 67 | Kandang Koloni Domba Garut | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 68 | Kandang Indukan Domba Garut | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 69 | Kandang Pejantan Domba Garut Knock Down | 10 | 10 | 0 | 0 |

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian DKPP Kota Bandung, 2021

Catatan : B = Baik
KB = Kurang Baik
RB = Rusak Berat

Lokasi Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Dinas, lokasi yang terpisah dari kompleks perkantoran Pemerintah Kota Bandung di Jl. Wastukencana memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus.

Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, scanner dll) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang memadai.

Permasalahan pada asset, sarana dan prasarana di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung berkaitan dengan kapasitas gedung yang masih bersatu dengan Rumah Potong Hewan (RPH) sehingga dari sanitasi lingkungan masih kurang memadai, serta

sebagai bangunan bersejarah (heritage) Kota Bandung yang memerlukan perlakuan khusus serta biaya pemeliharaan.

Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset adalah banyaknya barang yang sudah rusak tetapi belum dilakukan penghapusan, serta tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan dokumen produk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya adalah : **(1) Urusan Wajib** terdiri dari Urusan Pangan dan **(2) Urusan Pilihan** terdiri dari Urusan Pertanian, dan Urusan Kelautan dan Perikanan. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung Tahun 2013 - 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.6

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung 2013-2018

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- (%) | | | | |
|-----|---|---------------|--|--------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|--------|--------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | Urusan Wajib | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ketahanan Pangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | SPM 2010-2015 | Ketersediaan Pangan Utama (IKK 3 - 42) | | 87.8 | 91.25 | 91.50 | 91.68 | 91.69 | 91.20 | 91.26 | 91.67 | 91.69 | 91.69 | 103.87 | 100.01 | 100.19 | 100.01 | 100.00 |
| 2 | Cadangan Pangan Ekuivalen Beras (Ton) | | Ketersediaan Pangan Utama (IKK 3 - 42) | | 24 | 60 | 60 | 60 | 60 | 26.70 | 72.26 | 82.29 | 79.837 | 89,057 | 111.25 | 120.43 | 137.15 | 133.06 | 148.43 |
| 3 | Tingkat Konsumsi Beras | | | | 96.40 | 91.40 | 91.31 | - | - | 96.1 | 91.31 | 91.01 | - | - | 100.31 | 100.10 | 100.33 | - | - |
| 4 | Tingkat Konsumsi Daging | | | | 15.84 | 16.12 | 16.52 | - | - | 15.95 | 17.62 | 18.2 | - | - | 100.69 | 109.31 | 110.17 | - | - |
| 5 | Tingkat Konsumsi Ikan | | | | 33.50 | 34.20 | 36.03 | - | - | 33.95 | 34.28 | 36.94 | - | - | 101.34 | 100.23 | 102.53 | - | - |
| | Urusan Pilihan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6 | Produksi Ikan Konsumsi (Ton) | | Produksi Perikanan (IKK 3 - 1 Agregasi) | | 2,600 | 2,846 | 2,931 | 2,970 | 2,970 | 2,764 | 2,877 | 2,965 | 2,970.70 | 2,970.63 | 106.31 | 101.09 | 101.16 | 100.02 | 100.02 |
| 7 | Produksi Ikan Hias (ekor) | | Produksi Perikanan (IKK 3 - 2 Agregasi) | | 821,700 | 921,700 | 1.021.700 | 1.121.700 | 1.221.700 | 907,670 | 922,900 | 1,023,104 | 1,123,590 | 1,260,869 | 110.46 | 100.13 | 100.14 | 100.17 | 103.21 |
| | Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Produktivitas Tanaman Padi (kw/ha) | | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (IKK 3 - 3 Agregasi) | | 63.09 | 65.05 | 68.04 | - | - | 65.03 | 65.05 | 68.05 | - | - | 103.07 | 100.00 | 100.01 | - | - |
| 9 | Produksi tanaman hias | | | | 186,500 | 188,500 | 190,000 | 192,000 | 195,000 | 186,920 | 189,002 | 190,754 | 195,442 | 198,959 | 100.23 | 100.27 | 100.40 | 101.79 | 102.03 |
| 10 | Produksi tanaman sayuran | | | | - | - | - | 250,000 | 250,000 | - | - | - | 276,810 | 252,400 | - | - | - | 110.72 | 100.96 |
| 11 | Produksi tanaman buah-buahan (Pohon Produktif) | | | | - | - | - | 15,000 | 15,000 | - | - | - | 23,309 | 15,751 | - | - | - | 155.39 | 105.01 |
| 12 | Populasi ternak Sapi | | | | 1,417 | 1,604 | 1,648 | - | - | 1,554 | 1,625 | 1,670 | - | - | 109.67 | 101.31 | 101.33 | - | - |
| 13 | Populasi ternak Domba | | | | 29,365 | 30,833 | 32,375 | 33,994 | 35,693 | 29,955 | 30,991 | 32,549 | 34,684 | 35,702 | 102.01 | 100.51 | 100.54 | 102.03 | 100.03 |
| 14 | Jumlah maksimum kasus penyakit Zoonosa di Kota Bandung | | | | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.50 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 15 | Jumlah maksimum Pangan Segar yang Tercemar | | | | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 0 | 20 | 13 | 0 | 6 | 200 | 160 | 167 | 200 | 200 |
| 16 | Jumlah Pelaku Usaha Bidang Pertanian dan Perikanan - Budidaya | | | | 690 | 750 | - | - | - | 695 | 755 | - | - | - | 100.72 | 100.67 | - | - | - |
| 17 | Jumlah Pelaku Usaha Bidang Pertanian dan Perikanan - Olahan | | | | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 935 | 420 | 200 | 554 | 342 | 935.00 | 280.00 | 100.00 | 221.60 | 114.00 |
| 18 | Jumlah pelaku usaha yang menggunakan sarana teknologi Pertanian dan Perikanan - Budidaya | | | | 600 | 630 | - | - | - | 603 | 640 | - | - | - | 100.50 | 101.59 | - | - | - |
| 19 | Jumlah pelaku usaha yang menggunakan sarana teknologi Pertanian dan Perikanan - Olahan | | | | 100 | 160 | - | - | - | 120 | 162 | - | - | - | 120.00 | 101.25 | - | - | - |
| 20 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | | | 75 | 80 | 82 | 82 | 83 | 79 | 81.07 | 82.33 | 82.33 | 83.06 | 105.33 | 101.34 | 100.40 | 100.40 | 100.07 |
| 21 | Nilai evaluasi AKIP | | | | 63 | 75 | 76 | 77 | 78 | 74.57 | 76.87 | 77.15 | 77.74 | - | 118.37 | 102.49 | 101.51 | 100.96 | - |

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung 2018-2023

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi | Target NSP K | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- (%) | | | | |
|-----|--|--------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|------|------|------|----------------------------------|--------|------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | Urusan Wajib | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ketahanan Pangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (angka) | | Ketersediaan Pangan Utama (IKK 3 - 42) | | 84,26 | 84,27 | 84,28 | 84,29 | 84,30 | 85,08 | 90,50 | - | - | - | 100,97 | 107,39 | - | - | - |
| 2 | Jumlah Cadangan Pangan Ekuivalen Beras (ton) | | Ketersediaan Pangan Utama (IKK 3 - 42) | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 103,045 | 122,27 | - | - | - | 128,81 | 152,84 | - | - | - |
| 3 | Persentase Pangan Segar yang Aman Dikonsumsi (%) | | | | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 99,77 | 99,93 | - | - | - | 109,64 | 108,62 | - | - | - |
| 4 | Jumlah Kelompok Masyarakat di Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan diberdayakan (kelompok) | | | | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 47 | 48 | - | - | - | 104,44 | 100,00 | - | - | - |
| | Urusan Pilihan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Produksi Ikan Konsumsi (ton) | | Produksi Perikanan (IKK 3 - 1 Agregasi) | | 2.970 | 2.970,5 | 2.971 | 2.971,5 | 2.972 | 2.981,27 | 1.921,09 | - | - | - | 100,38 | 64,67 | - | - | - |
| 6 | Produksi Ikan Hias (ekor) | | Produksi Perikanan (IKK 3 - 2 Agregasi) | | 1.222.000 | 1.272.000 | 1.322.000 | 1.372.000 | 1.422.000 | 1.823.200 | 1.282.236 | - | - | - | 149,20 | 100,80 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|---|--------|--------|---|---|---|
| 7 | Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kap/thn) | | | | 37,95 | 37,97 | 37,99 | 38,00 | 38,02 | 40,23 | 40,24 | - | - | - | 106,02 | 105,98 | - | - | - |
| 8 | Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Perikanan (orang) | | | | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 85 | 30 | - | - | - | 106,25 | 33,33 | - | - | - |
| | Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Produktivitas Tanaman Padi (kw/ha) | | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (IKK 3 - 3 Agregasi) | | 68,08 | 68,22 | 68,36 | 68,50 | 68,64 | 68,08 | 68,23 | - | - | - | 100,01 | 100,00 | - | - | - |
| 10 | Produksi Tanaman Hias (pohon) | | | | 155.48 5 | 161.86 4 | 168.48 9 | 175.36 9 | 182.76 3 | 412.14 4 | 163.89 5 | - | - | - | 265,07 | 101,25 | - | - | - |
| 11 | Produksi Tanaman Sayuran (pohon) | | | | 237.00 0 | 278.40 0 | 287.93 6 | 297.62 1 | 308.27 0 | 813.88 0 | 767.34 0 | - | - | - | 343,41 | 275,63 | - | - | - |
| 12 | Jumlah penanaman Pohon buah-buahan (pohon) | | | | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 53.869 | 20.717 | - | - | - | 538,69 | 188,34 | - | - | - |
| 13 | Bertambahnya Pelaku Usaha Bidang Pertanian (orang) | | | | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 102 | 45 | - | - | - | 127,50 | 50,00 | - | - | - |
| 14 | Populasi ternak Domba (ekor) | | | | 36.756 | 37.829 | 38.437 | 39.158 | 39.849 | 36.793 | 37.844 | - | - | - | 100,10 | 100,04 | - | - | - |
| 15 | Bertambahnya Pelaku Usaha Bidang Peternakan (orang) | | | | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 81 | 32 | - | - | - | 101,25 | 35,55 | - | - | - |
| 16 | Jumlah Maksimum Kasus Penyakit Zoonosa (kasus) | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | 200,00 | 200,00 | - | - | - |
| 17 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (nilai) | | | | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83,19 | 90,03 | - | - | - | 101,45 | 108,47 | - | - | - |

Dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung 2018 – 2023 diatas, dapat kita jabarkan bahwa **Program-program pada Urusan Pangan** yang dilaksanakan pada tahun 2013 – 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Ketahanan Pangan
- 2) Program Peningkatan Keamanan Pangan Hasil Pertanian
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan

Capaian Kinerja

1) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi sumbangan energi, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi penyediaan atau konsumsi pangan yang mampu mencukupi kebutuhan pangan dan gizi penduduk, baik dalam jumlah kualitas maupun keragamannya. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Penghitungan Skor PPH dimaksudkan untuk menganalisis pola konsumsi pangan suatu masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal (Pola Pangan Harapan).

Pada periode Tahun 2016-2018, Skor PPH yang dihitung yaitu Skor PPH ketersediaan sedangkan pada tahun 2019-2023 yaitu Skor PPH konsumsi dengan pertimbangan teknis bahwa yang dijadikan acuan untuk mengetahui pola konsumsi pangan masyarakat adalah Skor PPH konsumsi. Skor PPH Ketersediaan dihitung untuk mendapatkan Ketersediaan Energi dan Zat Gizi yang dihasilkan dari 11 kelompok bahan makanan dengan tujuan untuk memberikan gambaran kualitas keragaman ketersediaan pangan yang siap dikonsumsi oleh penduduk/masyarakat. Sedangkan Skor PPH Konsumsi merupakan Skor PPH yang memuat indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100, semakin tinggi skor PPH maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Capaian Skor PPH konsumsi Kota Bandung tahun 2019-2020 sudah beragam meskipun belum mencapai kondisi ideal. Pada tahun 2019 indikator skor PPH konsumsi terealisasi sebesar 85,08 dari target yang

ditetapkan sebesar 84,26 (100,97%) dan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 90,50 dari target 84,27 (107,39%). Artinya konsumsi pangan penduduk Kota Bandung belum beragam dan seimbang karena belum mencapai skor ideal 100. Jika skor PPH mencapai 100, maka wilayah tersebut dikatakan tahan pangan. Perbandingan nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Perbandingan Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Tahun 2016 – 2020

| No | Kelompok Pangan | Skor Maks | Skor PPH Ketersediaan | | | Skor PPH Konsumsi | |
|--------------|---------------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Padi-padian | 25,00 | 23,18 | 22,77 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 2 | Umbi-umbian | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1,75 | 1,84 | 0,80 |
| 3 | Pangan Hewani | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 4 | Minyak dan Lemak | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 5 | Buah/Biji Berminyak | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,1 |
| 6 | Kacang-kacangan | 10,00 | 7,30 | 6,42 | 6,91 | 6,60 | 7,30 |
| 7 | Gula | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 2,20 | 2,42 | 1,1 |
| 8 | Sayur dan Buah | 30,00 | 28,69 | 30,00 | 19,65 | 20,16 | 21,7 |
| 9 | Lain-lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 100,00 | 91,67 | 91,69 | 91,69 | 85,08 | 90,50 |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 dan 2020 konsumsi pangan di Kota Bandung belum beragam dan seimbang. Hal ini dapat dilihat dari jenis pangan yang sudah mencapai skor maksimum, diantaranya padi-padian (25,00), pangan hewani (24,00), minyak dan lemak (5,00). Sedangkan kelompok pangan yang belum mencapai skor maksimum dari data dua tahun terakhir adalah umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi keenam kelompok pangan tersebut belum maksimal. Skor PPH konsumsi pangan tahun 2019 sebesar 85,08 sedangkan tahun 2020 sebesar 90,50.

Skor PPH konsumsi pangan di Kota Bandung masih kurang dari standar 100 sehingga perlu adanya upaya meningkatkan kualitas konsumsi pangan penduduk agar mencapai pola konsumsi pangan yang ideal. Perlu adanya sosialisasi dan promosi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) dalam rangka gerakan sadar pangan dan gizi sehingga konsumsi pangan

masyarakat mengarah pada beragam, bergizi dan berimbang sehingga skor PPH ideal (100) dapat tercapai.

Hasil analisis dari bahasan bahwa konsumsi pangan penduduk Kota Bandung masih perlu ditingkatkan keragamannya. Keragaman dari aspek kelompok pangan dan juga komoditas di dalam kelompok tersebut disesuaikan dengan konsep Pola Pangan Harapan (PPH) dan potensi sumberdaya lokal, dalam hal ini dikaitkan dengan penyediaan pangan. Konsumsi beras, terigu dan pangan hewani serta minyak dan lemak harus diturunkan, sebaliknya konsumsi pangan lokal seperti jagung dan umbi-umbian harus ditingkatkan secara signifikan. Konsumsi kacang-kacangan, sayur dan buah juga masih harus ditingkatkan secara signifikan untuk mencapai diversifikasi konsumsi pangan sesuai PPH.

2) Jumlah Cadangan Pangan Ekuivalen Beras

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menanggulangi kekurangan pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau menghadapi keadaan darurat serta untuk pengisian ATM Beras. Pemerintah Kota Bandung menyediakan cadangan pangan ekuivalen beras dengan target minimal 80 ton setiap tahunnya. Realisasi capaian indikator kinerja tahun 2017 adalah sebesar 79,837 ton dan terus meningkat sampai dengan tahun 2020 mencapai 122,27 ton. Komitmen kepala daerah dalam mencukupi pangan warga miskin menjadi faktor pendorong utama atas kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan cadangan pangan diatas besaran minimal yang ditetapkan.

3) Persentase Pangan Segar yang Aman Dikonsumsi

Pangan yang aman dikonsumsi yaitu pangan yang bebas kasus cemaran bahan kimia/cemaran mikroba. Jenis pangan segar yang diperiksa meliputi hasil tanaman pangan dan hortikultura (buah-buahan, sayuran, beras, palawija, dan rempah-rempah), hasil peternakan (telur, daging, dan susu), dan hasil perikanan (ikan segar dan ikan asin). Sampel yang diperiksa yaitu sampel pangan segar yang berasal dari pasar modern, pasar tradisional, distributor dan sampel dari pembuat sertifikat veteriner. Produk pangan segar yang masuk ke Kota Bandung sebagian besar berasal dari luar Bandung (96%) karena itu pengawasan dan pemeriksaan keamanan pangan

segar harus rutin dan terus menerus dilakukan sebagai salah satu upaya untuk dapat memberikan rasa aman dan nyaman, menjamin atau memastikan bahwa pangan segar yang beredar di Kota Bandung aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Dari hasil pemeriksaan dan pengawasan tahun 2019, jumlah sampel pangan segar yang aman dikonsumsi sebesar 99,77% dan pada tahun 2020 ditemukan 5 kasus cemaran pada sampel yang diperiksa, sehingga jika dibandingkan sampel pangan segar yang aman dikonsumsi dengan jumlah sampel pangan segar yang diperiksa maka persentase pangan segar yang aman dikonsumsi sebesar 99,93%.

4) Jumlah Kelompok Masyarakat di Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan Diberdayakan

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan kesadaran, kemampuan, keahlian serta kekuatan untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat di bidang pangan, pertanian, dan perikanan yang dilakukan oleh DKPP Kota Bandung melalui sosialisasi, pelatihan, pembinaan, pendampingan, serta fasilitasi pembentukan kelompok sesuai potensinya. Pada tahun 2019 jumlah kelompok yang telah difasilitasi, dibina dan didampingi dalam upaya untuk pemberdayaan masyarakat sebanyak 47 kelompok dari target 45 kelompok atau sebesar 104,44%, dan pada tahun 2020 dari target 48 kelompok terealisasi sebanyak 48 kelompok (100%).

Program-program pada Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan pada tahun 2013-2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- 2) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- 3) Program Peningkatan Keamanan Pangan Hasil Perikanan

Capaian Kinerja

1) Produksi Ikan Konsumsi

Budidaya atau produksi ikan konsumsi adalah proses memperbanyak, merawat, menjaga kelestarian ikan konsumsi dalam kegiatan yang dilakukan

oleh orang atau badan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang (ikan) atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Produksi ikan konsumsi diperoleh dari jenis ikan mas, nila, dan lele. Produksi ikan konsumsi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 selalu mencapai target, namun pada tahun 2020 realisasi produksi ikan konsumsi hanya mencapai 64,67% dari target 2.970,5 ton terealisasi sebanyak 1.921,09 ton. Hal ini disebabkan produksi dan pemasaran menurun akibat pandemi covid-19, sehingga petani memilih untuk menghentikan kegiatan pembudidayaan ikan sementara waktu. Selain itu pemasaran ikan juga sulit karena adanya pembatasan aktivitas selama pandemi.

2) Produksi Ikan Hias

Budidaya atau produksi ikan hias adalah proses memperbanyak, merawat, menjaga kelestarian ikan hias dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang (ikan) atau jasa.

Berbeda dengan produksi ikan konsumsi, jumlah produksi ikan hias pada tahun 2020 mencapai 100,80% yaitu dari target 1.272.000 ekor terealisasi 1.282.236 ekor, hal ini disebabkan pada masa pandemi dengan pembatasan aktivitas masyarakat banyak yang tertarik memelihara ikan hias bahkan dijadikan sebagai salah satu usaha yang menjanjikan di masa pandemi. Pembudidayaan ikan hias di Kota Bandung ada di Kecamatan Regol, Astana Anyar, Cibiru, Rancasari, Gedebage dan Ujung Berung. Realisasi capaian kinerja produksi ikan hias dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :



3) Tingkat Konsumsi Ikan

Tingkat konsumsi ikan merupakan jumlah konsumsi protein hewani yang berasal dari ikan di suatu daerah. Tingkat konsumsi ikan di Kota Bandung selalu mencapai target, pada tahun 2019 dari target 37,95 kg/kapita/thn terealisasi sebesar 40,23 kg/kapita/thn atau sebesar 106,02%, dan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 40,24 kg/kapita/thn dari target 37,97 kg/kapita/thn. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang di Kota Bandung rata-rata mengkonsumsi ikan sebanyak 40 kg per tahun, nilai ini masih lebih baik dibandingkan dengan tingkat konsumsi Ikan Provinsi Jawa Barat sebesar 29,95 kg/kap/tahun. Capaian tersebut disebabkan kesadaran masyarakat Kota Bandung untuk mengkonsumsi ikan sudah mulai meningkat.

4) Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Perikanan

Pelaku usaha bidang perikanan yang dimaksud adalah pelaku usaha olahan hasil perikanan setiap orang/perorangan, kelompok, serta badan usaha yang telah diberikan pelatihan atau bimbingan teknis dan pendampingan. Pada tahun 2019 target 80 orang terealisasi sebanyak 85 orang (106,25%), namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dari target 90 orang hanya terealisasi 30 orang atau sebesar 33,33%. Masa pandemi covid-19 menjadi hambatan dalam pencapaian target, pelaksanaan pelatihan olahan yang menjadi awal terbentuknya pelaku usaha tidak dapat dilaksanakan secara

maksimal karena pelatihan dilaksanakan secara online, selain itu pembatasan aktivitas menyebabkan pemasaran produk terhambat.

Program-program pada Urusan Pertanian yang dilaksanakan pada tahun 2013-2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
- 2) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
- 3) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- 4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
- 5) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
- 6) Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku
- 7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- 8) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- 9) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
- 10) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Capaian Kinerja

1) Produktivitas Tanaman Padi

Produktivitas padi adalah produksi padi (padi sawah dan padi ladang) yang dihitung per satuan luas lahan. Produktivitas padi dihitung berdasarkan jumlah produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) per satuan luas lahan, yaitu kuintal per hektar. Produktivitas tanaman padi setiap tahunnya mampu mencapai realisasi 100%. Produktivitas tanaman padi menunjukkan besarnya produksi padi yang dihasilkan pada suatu lahan dengan luasan tertentu. Produktivitas tanaman padi pada tahun 2019 mencapai 68,08 kw/ha dari target 68,08 kw/ha atau 100,01% dan pada tahun 2020 dari target 68,22 kw/ha terealisasi 68,23 kw/ha atau mencapai 100,01%. Faktor pendukung pencapaian kinerja ini antara lain disebabkan oleh semakin meningkatnya pengetahuan petani dan penerapan teknologi dari pelatihan maupun workshop yang diikutinya.

2) Produksi Tanaman Hias

Produksi tanaman hias adalah hasil tanaman hias yang diperoleh dari lahan pertanian dalam periode waktu tertentu. Produksi tanaman hias diperoleh dari produksi di kelompok/masyarakat ditambah dengan produksi dari UPT Pembibitan Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan. Pada tahun 2019 dari target 155.485 pohon terealisasi sebanyak 412.144 pohon atau sebesar 265,07% sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 101,25% dari target 161.864 pohon terealisasi sebanyak 163.895 pohon.

3) Produksi Tanaman Sayuran

Produksi tanaman sayuran adalah hasil sayuran yang diperoleh dari lahan pertanian dalam periode waktu tertentu yang diukur dengan satuan tertentu. Jumlah produksi tanaman sayuran tahun 2019 sebanyak 813.880 pohon dari target 237.000 pohon (343,41%) dan pada tahun 2020 tercapai sebanyak 767.340 pohon (275,63%). Ketercapaian produksi tanaman sayuran merupakan dampak dari dilaksanakannya program Urban Farming secara masif melalui gerakan Buruan Sae, sehingga masyarakat mempunyai minat untuk berkebun sayuran walaupun di lahan yang sempit, selain itu juga dilakukan penyuluhan dan pelatihan kepada kelompok tani secara rutin yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan dan kolaborasi seluruh unsur dinas.

4) Jumlah Penanaman Pohon Buah-buahan

Penanaman pohon buah-buahan adalah aktifitas menanam pohon komoditi buah-buahan untuk diambil manfaatnya, selain menghasilkan buah juga mempunyai fungsi untuk penghijauan dalam rangka meningkatkan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH). Jumlah penanaman pohon buah-buahan pada tahun 2020 terealisasi sebanyak 20.717 dari target 11.000 pohon (188,34%). Adapun jenis pohon yang ditanam diantaranya, sawo, mangga, rambutan, nangka, sirsak, matoa, petai, jeruk, dan lengkung tersebar di seluruh wilayah kecamatan melalui program Bandung Menanam.

5) Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Pertanian

Pelaku usaha bidang pertanian adalah pelaku usaha olahan hasil pertanian setiap orang/perorangan, kelompok, serta badan usaha yang telah diberikan pelatihan atau bimbingan teknis serta pendampingan. Pada tahun 2019 target 80 orang terealisasi sebanyak 102 orang (127,50%), dan pada tahun

2020 mengalami penurunan sebesar 50,00% dari target 90 orang hanya terealisasi 45 orang. Masa pandemi covid-19 menjadi hambatan dalam pencapaian target, pelaksanaan pelatihan olahan yang menjadi awal terbentuknya pelaku usaha tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena pelatihan dilaksanakan secara online, selain itu pembatasan aktivitas menyebabkan pemasaran produk terhambat. Hal ini terjadi karena pada masa pandemi ada beberapa kegiatan yaitu pelatihan kemasan dan pendampingan perizinan usaha Halal dan PIRT tidak dapat dilaksanakan, padahal kedua kegiatan tersebut outputnya merupakan tolak ukur dalam mengetahui jumlah pelaku usaha.

6) Populasi Ternak Domba

Populasi ternak domba di Kota Bandung merupakan jumlah domba yang dihitung berdasarkan dari : a) Domba yang dikembangbiakkan atau domba yang dipelihara di peternak yang terdiri dari domba konsumsi dan domba kontes; b) Domba yang diperjualbelikan adalah domba yang sudah dijual oleh peternak untuk dikonsumsi dan untuk hewan qurban/aqiqah; dan c) Domba yang digemukan adalah domba yang dipelihara dalam kurun waktu tertentu (4 -6 bulan). Realisasi tahun 2019 sebanyak 36.793 ekor dari target 36.756 ekor (100,10%) dan pada tahun 2020 sebanyak 37.844 ekor dari target 37.829 ekor (100,04%).

7) Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Peternakan

Pelaku usaha bidang peternakan yang dimaksud adalah pelaku usaha olahan hasil peternakan setiap orang/perorangan, kelompok, serta badan usaha yang telah diberikan pelatihan atau bimbingan teknis dan pendampingan. Pada tahun 2019 target 80 orang terealisasi sebanyak 81 orang (101,25%), dan pada tahun 2020 capaian kinerja tidak tercapai dari target 90 orang terealisasi sebanyak 32 orang (35,55%). Masa pandemi covid-19 menjadi hambatan dalam pencapaian target, pelaksanaan pelatihan olahan yang menjadi awal terbentuknya pelaku usaha tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena pelatihan dilaksanakan secara online, selain itu pembatasan aktivitas menyebabkan pemasaran produk terhambat.

8) Jumlah Maksimum Kasus Penyakit Zoonosa

Penyakit zoonosa adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya, meliputi penyakit rabies, penyakit avian

influenza/flu burung, penyakit anthraks, brucellosis. Kota Bandung merupakan pusat pemasaran ternak terbesar di Jawa Barat, sehingga resiko masuknya penyakit zoonosa dari daerah asal ternak ke Kota Bandung relatif tinggi. Adanya temuan kasus penyakit zoonosa diperoleh dari monitoring lapangan oleh petugas dinas, koordinasi dengan Dinkes Kota Bandung, dan laporan masyarakat tentang kasus gigitan hewan penular rabies serta kematian unggas. Selama tahun 2019 dan 2020 ditemukan kasus gigitan hewan dan kematian unggas, namun setelah ditindaklanjuti tidak menunjukkan adanya penyakit rabies dan flu burung. Perhitungan pada indikator ini menggunakan perhitungan persentase menurun, dimana semakin sedikit kasus yang ditemukan menunjukkan semakin baik.

Tabel 2.8
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---|--------|--------|--------|--------|-----------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Urusan Wajib | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urusan Pangan | 1.656.000.000 | 1.700.000.000 | 1.956.000.000 | 2.569.846.418 | 2.669.488.189 | 1.627.964.367 | 1.673.760.950 | 1.923.147.350 | 2.413.995.840 | 2.620.872.275 | 98,31% | 98,46% | 98,32% | 93,94% | 98,18% | 13,24 | 12,95 |
| Urusan Pilihan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kelautan dan Perikanan | 1.050.000.000 | 2.350.000.000 | 1.797.200.000 | 2.318.116.150 | 1.403.488.917 | 1.035.965.390 | 2.291.912.250 | 1.747.483.305 | 2.171.788.590 | 1.264.342.441 | 98,66% | 97,53% | 97,23% | 93,69% | 90,09% | 22,45 | 19,99 |
| Pertanian | 18.391.107.000 | 19.404.391.000 | 14.996.461.000 | 9.914.228.870 | 6.209.550.329 | 16.987.773.740 | 15.466.835.755 | 14.738.890.331 | 9.443.099.555 | 5.736.509.942 | 92,37% | 79,71% | 98,28% | 95,25% | 92,38% | - 22,12 | - 22,21 |

Urusan Pangan

Pada tahun 2013 sampai dengan 2018, total alokasi anggaran Urusan Pangan adalah sebesar Rp 11.828.734.607,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 11.516.753.032,00 (97,36%). Adapun Tahun 2019, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp 7.383.012.449,00 dan terealisasi sebesar Rp 7.159.194.711,00 (96,97%). Pada tahun 2020 mengalami penurunan anggaran menjadi Rp. 4.060.586.514,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.879.160.330,00 (95,53%).

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Urusan Pangan Tahun 2013 – 2020

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2013 | 1.277.400.000 | 1.257.012.250 | 98,40 |
| 2014 | 1.656.000.000 | 1.627.964.367 | 98,31 |
| 2015 | 1.700.000.000 | 1.673.760.950 | 98,46 |
| 2016 | 1.956.000.000 | 1.923.147.350 | 98,32 |
| 2017 | 2.569.846.418 | 2.413.995.840 | 93,94 |
| 2018 | 2.669.488.189 | 2.620.872.275 | 98,18 |
| 2019 | 7.383.012.449 | 7.159.194.711 | 96,97 |
| 2020 | 4.060.586.514 | 3.879.160.330 | 95,53 |

Sumber : DKPP Kota Bandung, 2021

Urusan Kelautan dan Perikanan

Pada tahun 2013 sampai dengan 2018, total alokasi anggaran Urusan Kelautan dan Perikanan adalah sebesar Rp 9.398.905.067,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 8.982.647.976,00 (95,57%). Tahun 2019, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp 1.590.417.806,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 1.457.793.532,00 (91,66%). Pada tahun 2020 anggaran menjadi Rp. 1.120.920.503,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.026.107.895,00 (91,54%).

Tabel 2.10
 Anggaran dan Realisasi Urusan Kelautan dan Perikanan
 Tahun 2013 – 2020

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2013 | 480.100.000 | 471.156.000 | 98,14 |
| 2014 | 1.050.000.000 | 1.035.965.390 | 98,66 |
| 2015 | 2.350.000.000 | 2.291.912.250 | 97,53 |
| 2016 | 1.797.200.000 | 1.747.483.305 | 97,23 |
| 2017 | 2.318.116.150 | 2.171.788.590 | 93,69 |
| 2018 | 1.403.488.917 | 1.264.342.441 | 90,09 |
| 2019 | 1.590.417.806 | 1.457.793.532 | 91,66 |
| 2020 | 1.120.920.503 | 1.026.107.895 | 91,54 |

Sumber : DKPP Kota Bandung, 2021

Urusan Pertanian

Pada tahun 2013 sampai dengan 2018, total alokasi anggaran Urusan Pertanian adalah sebesar Rp 79.122.511.605 dan dapat terealisasi sebesar Rp 70.358.557.328 (88,92%). Tahun 2019, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp 1.590.417.806,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 1.457.793.532,00 (91,66%). Pada tahun 2020 anggaran menjadi Rp. 1.120.920.503,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.026.107.895,00 (91,54%).

Tabel 2.11
 Anggaran dan Realisasi Urusan Pertanian Tahun 2013 – 2020

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2013 | 9.381.578.315 | 8.525.114.376 | 90,87 |
| 2014 | 18.878.966.000 | 17.052.372.146 | 90,32 |
| 2015 | 20.995.691.000 | 16.654.011.490 | 79,32 |
| 2016 | 17.996.461.000 | 17.168.938.871 | 95,40 |
| 2017 | 11.869.815.290 | 10.958.120.445 | 92,32 |
| 2018 | 6.209.550.329 | 5.736.509.942 | 92,38 |
| 2019 | 4.301.023.429 | 4.067.238.307 | 94,56 |
| 2020 | 3.059.388.495 | 2.726.021.138 | 89,10 |

Sumber : DKPP Kota Bandung, 2021

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Seiring dengan penambahan jumlah penduduk Kota Bandung yang diiringi dengan meningkatnya kebutuhan pangan sementara lahan pertanian semakin sempit merupakan tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Tantangan utama saat ini adalah meningkatkan ketahanan pangan yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi suatu daerah yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, sehat, dan produktif secara berkelanjutan.

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam menjawab tantangan tersebut, salah satunya melaksanakan pembangunan ketahanan pangan melalui keterjaminan ketersediaan pangan lokal dengan urban farming terintegrasi berbasis pemberdayaan masyarakat dengan model/konsep Buruan Sae, yaitu sistem pertanian perkotaan/urban farming terintegrasi dengan pengelolaan (usaha) yang memadukan komponen pertanian, seperti tanaman horti, hewan ternak dan ikan dalam suatu kesatuan yang utuh. Tujuan utamanya yaitu ketahanan pangan keluarga dengan menghasilkan sendiri pangan untuk memenuhi kebutuhan harian. Selain itu, Buruan Sae juga mempunyai dampak lain terhadap Pemberdayaan masyarakat, dimana dengan adanya Buruan Sae masyarakat dapat membantu masyarakat lainnya dari hasil produksi pangan, dan untuk jangka panjangnya dapat menjadi sumber penghasilan sehingga dapat meningkatkan ekonomi. Hal ini karena sektor pangan, pertanian, dan perikanan memegang peranan cukup penting dalam sistem perekonomian yaitu merupakan *Resource Based* yang mampu menyerap dan memperluas kesempatan usaha/lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan dari perumusan adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dinas. Identifikasi permasalahan juga berdasarkan pada identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan nasional, yang pada tahun 2019-2020 terjadi perubahan akibat adanya pandemi covid-19.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang berkaitan dengan pelayanan di bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

Permasalahan Urusan Pangan

- 1) Ketergantungan penyediaan pangan dari luar Kota Bandung sangat tinggi mencapai 96%, hal tersebut karena Kota Bandung bukan merupakan daerah produsen dan lahan pangan pertanian semakin menurun.
- 2) Nilai skor PPH konsumsi Kota Bandung sudah cukup baik meskipun belum mencapai kondisi ideal. Penghitungan Skor PPH dimaksudkan untuk menganalisis pola konsumsi pangan masyarakat, yang selanjutnya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah, sehingga diperlukan data pendukung dari sektor terkait.
- 3) Penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman belum sepenuhnya dapat diimplementasikan, sehingga masih ditemukan kasus rawan pangan dan rentan pangan.
- 4) Program/kegiatan urusan Pangan menyangkut berbagai kepentingan mulai dari ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan yang dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa sektor, sehingga diperlukan kerjasama, koordinasi dan konsolidasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan urusan pangan.

- 5) Kota Bandung bukan merupakan daerah produksi sehingga pangan segar yang dijual dan dikonsumsi masyarakat sebagian besar berasal dari luar wilayah Kota Bandung, menyebabkan belum terjangkaunya semua lokasi penjualan pangan segar yang ada sehingga diperlukan pengawasan pangan segar yang lebih intensif.

Permasalahan Urusan Kelautan dan Perikanan

- 1) Semakin berkurangnya kolam budidaya perikanan sebagai akibat alih fungsi lahan di Kota Bandung.
- 2) Belum optimalnya penggunaan sarana prasarana budidaya dan penerapan teknologi perikanan.
- 3) Belum optimalnya pemasaran dan pengolahan hasil perikanan.
- 4) Masih kurangnya tenaga teknis perikanan khususnya Penyuluh Perikanan.

Permasalahan Urusan Pertanian

- 1) Semakin berkurangnya lahan pertanian sebagai akibat alih fungsi lahan.
- 2) Belum optimalnya penggunaan sarana prasarana dan penerapan teknologi pertanian tepat guna.
- 3) Kota Bandung merupakan pusat pemasaran ternak terbesar di Jawa Barat, sehingga resiko masuknya penyakit zoonosa (penyakit yang menular dari ternak ke manusia) dari daerah asal ternak ke Kota Bandung relatif tinggi.
- 4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan hewan/ternak.
- 5) Masih kurangnya tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Visi dan Misi Kota Bandung yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023, Visi Kota Bandung Tahun 2018 – 2023, adalah :

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA DAN AGAMIS”

Penjabaran Visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bandung** : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang.
- Unggul** : Dengan pencapaian berbagai prestasi pemerintah Kota Bandung yang diperoleh pada periode sebelumnya, maka ke depan tidak hanya mempertahankan pencapaian yang telah diraih sebelumnya, namun juga terus berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk sektor yang lain serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan bagi pembangunan Kota Bandung
- Nyaman** : Terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.
- Sejahtera** : Mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat. Masyarakat sejahtera tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari

kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Agamis : Satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang merupakan manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah konidisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023.

Visi Kepala Daerah Kota Bandung ditindaklanjuti oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam bentuk dukungan yang sesuai dengan tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam urusan pangan, urusan kelautan dan perikanan, serta urusan pertanian. Ketiga kewenangan daerah ini berkaitan erat dengan pencapaian visi Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis.

Dengan demikian visi *Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis* bermakna “layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur

yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani
3. Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan
4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan
5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi.

Misi Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 merupakan penjabaran dari Misi Tahap IV dalam RPJPD Kota Bandung 2005 – 2025. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

| Misi RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 | Misi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 |
|---|--|
| Misi 1: Meningkatkan sumber daya manusia yang handal dan religius. | Misi 1: Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing. |
| Misi 3: Mengembangkan kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran tinggi, serta berhati nurani. | |
| Misi 5: Meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan | Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien, dan bersih |
| Misi 2: Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing. | Misi 3: Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan. |
| Misi 4: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota. | Misi 4: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. |
| Misi 6: Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu (melalui pembiayaan | Misi 5: Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi. |

| | |
|---|--|
| pembangunan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat) | |
|---|--|

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas dengan Dokumen RPJMD 2018-2023, maka dalam penyusunan Perubahan Renstra harus berpedoman pada Perubahan RPJMD, artinya indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung harus diarahkan untuk mencapai target kinerja yang telah dicantumkan dalam Perubahan RPJMD.

Sama hal dengan Renstra sebelumnya, urusan dan kewenangan yang dimiliki DKPP Kota Bandung yaitu urusan pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan. Namun kontribusi dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Bandung mengalami sedikit perubahan, yang sebelumnya mendukung pada Misi 1, 3 dan 4 sekarang hanya pada Misi 1 dan 3 sedangkan untuk pelaksanaan pelayanan publik mendukung Misi 2.

| | | |
|---|---|---|
| <u>Misi 1</u> Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing | <u>Sasaran :</u> Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | - Skor Pola Pangan Harapan - Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan - Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan |
| <u>Misi 3</u> Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan | <u>Sasaran :</u> Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota | - Cakupan Masyarakat Miskin yang Pangannya Tercukupi - Persentase Pelaku Usaha di Sektor Pertanian dan Perikanan Aktif |

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia, permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian
Pertanian Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya.

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat | Sebagai Faktor | |
|----|--|---|--|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | <p>Pertumbuhan Komoditas Pangan:</p> <p>a. Padi = 3,56%/thn</p> <p>b. Jagung = 10,02%/thn Kedelai 20,05%/thn</p> <p>c. Kacang Tanah 10,20 %/thn</p> <p>d. Kacang Hijau = 4,55 %/thn</p> <p>e. Ubi Kayu = 4,55%/thn</p> <p>f. Ubi Jalar = 6,78%/thn</p> <p>g. Hortikultura (Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Tanaman Obat) = 5,55 %/thn</p> | <p>a. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global</p> <p>b. Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air.</p> <p>c. Status dan luas kepemilikan lahan petani sangat terbatas.</p> <p>d. Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian.</p> <p>e. Sistem perbenihan dan perbibitan nasional belum berjalan optimal.</p> <p>f. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani.</p> <p>g. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh.</p> <p>h. Belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian.</p> <p>i. Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian.</p> <p>j. Makin berkembangnya Hama dan penyakit tanaman (Organisme Pengganggu Tanaman)</p> <p>k. Kondisi infrastruktur jalan ke sentra produksi belum memadai</p> | <p>a. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global</p> <p>b. Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air.</p> <p>c. Status dan luas kepemilikan lahan petani sangat terbatas.</p> <p>d. Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian.</p> <p>e. Sistem perbenihan dan perbibitan nasional belum berjalan optimal.</p> <p>f. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani.</p> <p>g. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh.</p> | <p>a. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas</p> <p>b. UU No. 41 Thn 2009 tentang Lahan Pertanian Abadi dan Perda Provinsi Jawa Barat No. 27 Th. 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</p> <p>c. Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian</p> <p>d. Revitalisasi infrastruktur pertanian</p> <p>e. Penerapan teknologi ramah lingkungan</p> |

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.2.
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sasaran Renstra OPD Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Lingkup Pertanian Kabupaten/kota | Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat | Sebagai Faktor | |
|----|---|--|---|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pertumbuhan Tingkat Produksi Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura = 2-5%/tahun | <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global b. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air. c. Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian. d. Rendahnya kualitas dan kuantitas ketersediaan benih oleh penangkar lokal e. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya | <ul style="list-style-type: none"> a. Keterbatasan alokasi anggaran pembangunan pertanian b. Semakin tingginya alih fungsi lahan c. Menurunnya kesuburan lahan pertanian d. Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi e. Rendahnya penerapan teknologi perbenihan kepada penangkar lokal f. Menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian TPH g. Aksesibilitas petani terhadap sarana produksi dan permodalan terbatas h. Tingkat kehilangan hasil masih tinggi | <ul style="list-style-type: none"> a. Komitmen dari pimpinan daerah (Kab/Kota) beserta jajarannya dalam keberpihakan pada pembangunan pertanian b. PERDA Kabupaten /Kota tentang Lahan Budidaya Pertanian c. Fasilitasi ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air d. Pemberdayaan Penangkar Benih lokal melalui pendidikan dan penerapan teknologi e. Penerapan Teknologi Berbasis Ramah Lingkungan f. Fasilitasi Permodalan Pertanian yang |

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kota atau RTRWK yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Sedangkan fungsinya sebagai berikut:

- a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta
- b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. penataan ruang kawasan strategis kota.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. kebijakan dan strategi struktur ruang;
- b. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
- c. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai

kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional meliputi:

- a. mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung Timur
- b. membagi kota menjadi 8 (delapan) Sub Wilayah Kota (SWK), masing-masing dilayani oleh 1 (satu) SPK;
- c. mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;
- d. menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; dan
- e. menyetarakan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan.

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali meliputi:

- a. membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi;
- b. mengawasi fungsi dan hirarki jalan;
- c. meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan;
- d. memprioritaskan pengembangan sistem angkutan umum massal yang terpadu;
- e. menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan;
- f. mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan; dan
- g. mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota. Kebijakan pola ruang kota terdiri atas:
 - 1) perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;

2) optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung meliputi :

- a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;
- b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
- c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
- f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;
- g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

Penyediaan RTH publik dan privat yang menjadi target pemerintah Kota Bandung mudah-mudahan dapat tercapai, bukan saja melalui penambahan luasan mengingat Kota Bandung merupakan kawasan perkotaan dengan *high density* tetapi juga melalui pengembangan *roof garden*, *wall garden*, *urban farming*, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007 yang mengklasifikasikan RTH yang

pengembangan kawasan pusat ekologi kota, penerbitan Peraturan Daerah tentang *green building* serta *zoning regulation*.

Dalam kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Bandung sebagai kota jasa menjadi perhatian penting.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis, terdapat isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, yaitu :

- Penguatan ketahanan pangan
- Penganekaragaman konsumsi pangan
- Pengawasan keamanan pangan
- Perlindungan pangan masyarakat miskin
- Pemberdayaan masyarakat dan kelompok

- Penambahan pelaku usaha olahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan
- Pengendalian penyakit zoonosa

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi pada RPJMD yang terkait langsung tupoksi dan kewenangan dinas serta merupakan sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun .

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketahanan Pangan
2. Tersedianya Pangan bagi Masyarakat Miskin
3. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pangan
4. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

4.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran yang akan dicapai yaitu :

1. Terpenuhinya Ketersediaan Pangan yang Aman dan Sehat
2. Terwujudnya Kecukupan Pangan Masyarakat Miskin
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian dan Perikanan
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja

4.1.3 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, rasional, dan komprehensif. Strategi merupakan langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas

pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan fasilitasi ketersediaan dan kemudahan pangan bagi masyarakat.
2. Meningkatkan cakupan pemeriksaan mutu komoditas hasil tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan yang beredar di Kota Bandung.
3. Meningkatkan pemeriksaan kesehatan hewan dan ternak, terutama penyakit zoonosa.
4. Meningkatkan fasilitasi ketersediaan dan kemudahan pangan bagi masyarakat miskin.
5. Meningkatkan pembinaan, pelatihan, dan promosi pemasaran produk pertanian dan perikanan.
6. Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pengembangan usaha pertanian dan perikanan.
7. Meningkatnya pelayanan yang bersih dan akuntabel.

4.1.4 Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati bersama antara pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.

Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung adalah :

1. Meningkatnya pola konsumsi pangan, beragam, bergizi, berimbang dan aman.

2. Meningkatnya pemeriksaan mutu komoditas hasil tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan yang beredar di Kota Bandung.
3. Meningkatnya pengawasan penyakit zoonosa.
4. Tersedianya cadangan pangan daerah ekuivalen beras.
5. Meningkatnya fasilitasi promosi pemasaran, produk pertanian, perikanan dan hasil olahannya.
6. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk menghasilkan produk pertanian dan perikanan yang memiliki nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi.
7. Meningkatnya mutu pelayanan dan pengembangan sumber daya manusia.

Sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Bandung Tahun 2018-2023 (Setelah Perubahan)

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | Realisasi | | Target | | |
|-----|--|--|---|-----------|-------|--------|-------|-------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Meningkatnya Ketahanan Pangan | Terpenuhinya Ketersediaan Pangan yang Aman dan Sehat | Skor Pola Pangan Harapan (angka) | 85,08 | 90,50 | 84,28 | 85,00 | 85,80 |
| | | | Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan (%) | 99,97 | 99,93 | 99,10 | 99,20 | 99,30 |
| | | | Cakupan Penanganan Kasus Penyakit Zoonosa (%) | N/A | N/A | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Tersedianya Pangan Bagi Masyarakat Miskin | Terwujudnya Kecukupan Pangan Masyarakat Miskin | Cakupan Masyarakat Miskin yang Pangannya Tercukupi (%) | N/A | 0,98 | 1,31 | 1,63 | 1,96 |
| 3. | Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pangan | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian dan Perikanan | Persentase Pelaku Usaha di Sektor Pertanian dan Perikanan Aktif (%) | N/A | N/A | 70 | 75 | 80 |
| 4. | Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Dinas | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai) | 83,19 | 90,03 | 83 | 84 | 85 |

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 4.2. sebagai berikut :

Tabel 4.2.

Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung Tahun 2018 – 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | PENJELASAN |
|----|--|---|--------|---|
| 1 | Terpenuhinya ketersediaan pangan yang aman dan sehat | Skor Pola Pangan Harapan | Angka | Pola Pangan Harapan (PPH) adalah jenis dan jumlah kelompok pangan utama yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan gizi berdasarkan kontribusi energi masing-masing kelompok pangan. |
| 2 | Terwujudnya Kecukupan Pangan Masyarakat Miskin | Cakupan Masyarakat Miskin yang Pangannya Tercukupi | Persen | Cakupan masyarakat miskin yang pangannya tercukupi adalah masyarakat miskin yang diberi bantuan pangan melalui ATM Beras untuk meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka memberikan perlindungan sosial kepada rumah tangga miskin. |
| 3 | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian dan Perikanan | Persentase Pelaku Usaha di Sektor Pertanian dan Perikanan Aktif | Persen | Pelaku Usaha Pertanian dan Perikanan aktif merupakan pelaku usaha yang melakukan usaha yang sudah memperoleh pemberdayaan (pelatihan/penyuluhan/pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses/penguatan kelembagaan) dan masih aktif melakukan usahanya pada saat pendataan. |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. |

Tabel 4.3.
Pengukuran Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung Tahun 2013 – 2018

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | PENJELASAN | | | KETERANGAN/ KRITERIA |
|----|--|---|--------|--|---|-------------|---|
| | | | | ALASAN | FORMULASI/CARA PENGUKURAN | SUMBER DATA | |
| 1. | Terpenuhinya ketersediaan pangan yang aman dan sehat | Skor Pola Pangan Harapan | Angka | Skor PPH mencerminkan mutu gizi konsumsi pangan dan tingkat keragaman konsumsi pangan. | Skor PPH = Skor PPH kelompok padi-padian + umbi-umbian +....+ skor PPH kelompok lain-lain | DKPP | Skor PPH dikatakan ideal apabila nilainya mencapai 100. Semakin tinggi Skor PPH berarti konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. |
| 2 | Terwujudnya Kecukupan Pangan Masyarakat Miskin | Cakupan Masyarakat Miskin yang Pangannya Tercukupi | Persen | Salah satu upaya untuk mendekatkan akses pangan terhadap masyarakat kurang mampu yakni dengan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pangan (beras). Penerima manfaat adalah diprioritaskan warga miskin yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). | Cara pengukuran adalah : Jumlah masyarakat miskin yang diberi bantuan pangan ekuivalen beras / Jumlah masyarakat miskin yang terdaftar dalam DTKS x 100% | DKPP | Cakupan masyarakat miskin yang pangannya tercukupi adalah masyarakat miskin yang diberi bantuan pangan melalui ATM Beras untuk meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka memberikan perlindungan sosial kepada rumah tangga miskin. |
| 3 | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian dan Perikanan | Persentase Pelaku Usaha di Sektor Pertanian dan Perikanan Aktif | Persen | Salah satu upaya pemerintah dalam hal ini DKPP untuk pemberdayaan masyarakat melalui sektor pertanian dan perikanan | Cara pengukuran adalah : Jumlah Pelaku Usaha Pertanian dan Perikanan aktif / Jumlah Pelaku Usaha di Sektor Pertanian dan Perikanan binaan x100% | DKPP | Pelaku Usaha Pertanian dan Perikanan aktif merupakan pelaku usaha yang melakukan usaha yang sudah memperoleh pemberdayaan (pelatihan/penyuluhan/pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses/penguatan kelembagaan) dan masih aktif melakukan usahanya pada saat pendataan. |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | Salah satu upaya untuk memberikan pelayanan publik dengan pengukuran secara komprehensif | Cara pengukuran adalah : Total dari Nilai Persepsi per unsur x Nilai Penimbangan dibagi Total unsur | DKPP | Unsur penilaian SKM diantaranya: 1. Prosedur Pelayanan 2. Persyaratan Pelayanan 3. Kejelasan Petugas 4. Kedisiplinan Petugas 5. Tanggung Jawab Petugas |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | PENJELASAN | | | KETERANGAN/ KRITERIA |
|----|-------------------|-------------------------|--------|---|---------------------------|-------------|---|
| | | | | ALASAN | FORMULASI/CARA PENGUKURAN | SUMBER DATA | |
| | | | | tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. | yang terisi | | 6. Kemampuan Petugas 7. Kecapatan Pelayanan 8. Keadilan mendapatkan pelayanan 9. Kesopanan dan Keramahan Petugas |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung tahun 2018-2023 yaitu analisis Logic Model.

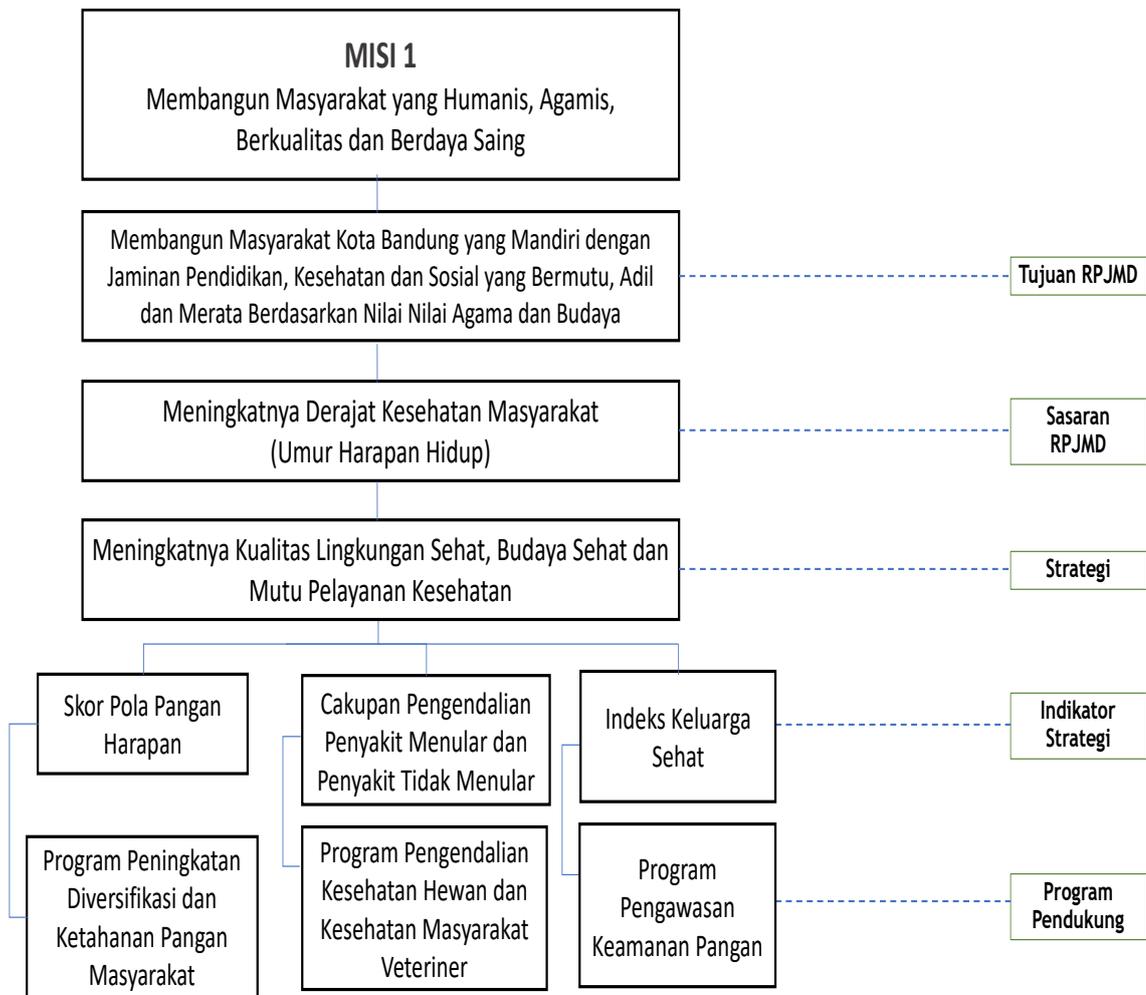
“**Logic Model** adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. Model logika ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. Sebuah model adalah gambaran pemikiran saat individu atau kelompok tentang bagaimana ide atau program mereka mungkin bekerja”.

Logic model membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bandung. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan teknis atau Perangkat Daerah. Hubungan antara unsur-unsur, baik interaksi relatif dan urutan berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi Pemerintah Kota maupun pada Perangkat Daerah. Logic model yang telah disusun oleh Dinas Ketahanan Pangan dan

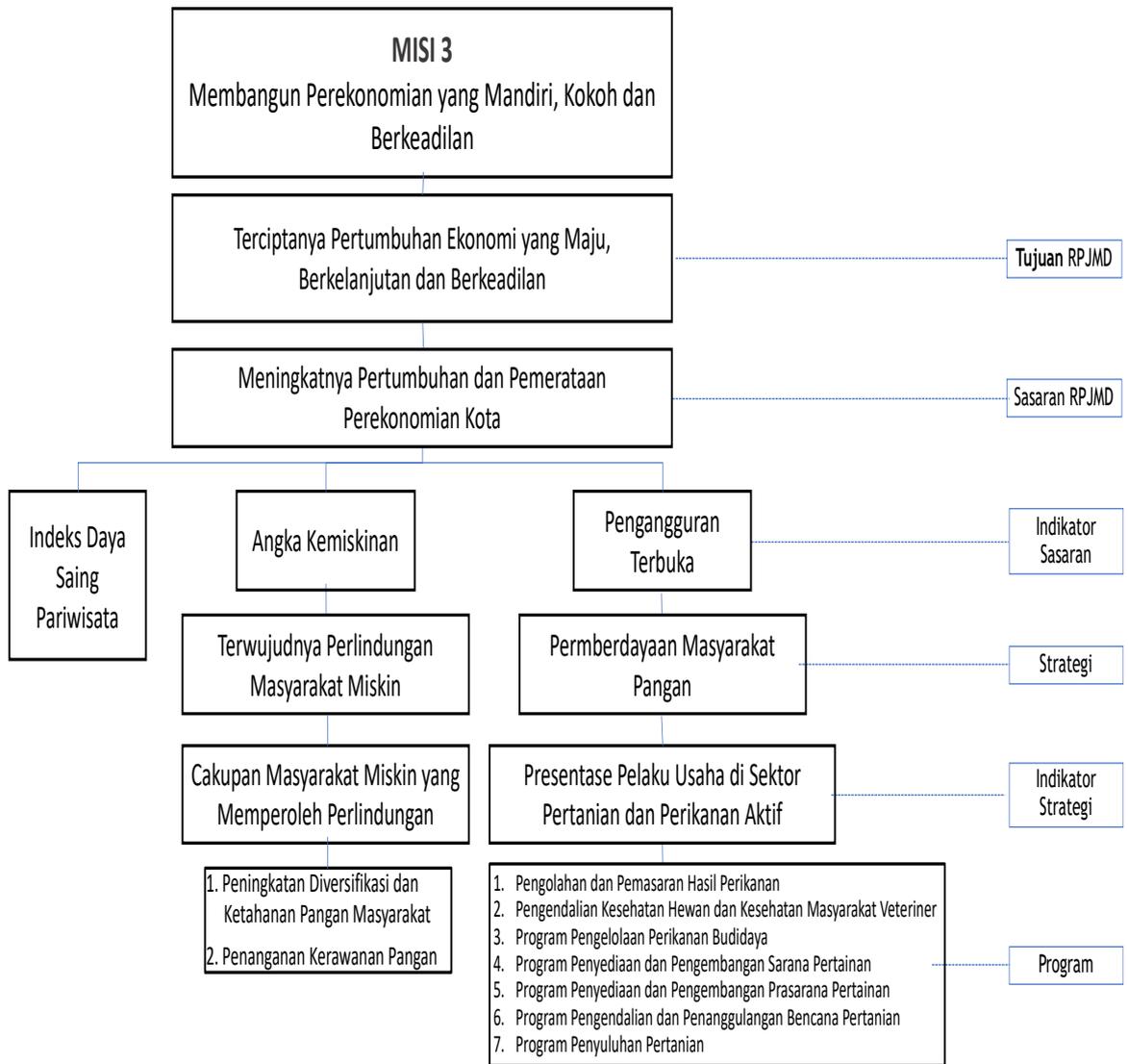
Pertanian Kota Bandung terdapat dalam 2 Misi, yaitu Misi 1 : Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing; serta Misi 3 : Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan.

Logic Model yang telah disusun adalah sebagaimana terlampir di bawah ini:

Logic Model Misi 1



Logic Model Misi 3



**Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

| | | | |
|--|--|---|--|
| VISI : TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA DAN AGAMIS | | | |
| MISI 1 : MEMBANGUN MASYARAKAT YANG HUMANIS, AGAMIS, BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatnya Ketahanan Pangan | Terpenuhinya Ketersediaan Pangan yang Aman dan Sehat | 1. Meningkatkan fasilitasi ketersediaan dan kemudahan pangan bagi masyarakat | 1. Meningkatkan pola konsumsi pangan, beragam, bergizi, berimbang dan aman |
| | | 2. Meningkatkan cakupan pemeriksaan mutu komoditas hasil pertanian, peternakan dan perikanan yang beredar di Kota Bandung | 2. Meningkatkan pemeriksaan mutu komoditas hasil tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan yang beredar di Kota Bandung |
| | | 3. Meningkatkan pemeriksaan kesehatan hewan dan ternak, terutama penyakit <i>zoonosa</i> | 3. Meningkatkan pengawasan penyakit <i>zoonosa</i> |
| MISI 2 : MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG MANDIRI, KOKOH, DAN BERKEADILAN | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja | Meningkatkan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik | Meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik |
| MISI 3 : MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG MANDIRI, KOKOH, DAN BERKEADILAN | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Tujuan 1 Tersedianya Pangan Bagi Masyarakat Miskin | Terwujudnya Kecukupan Pangan Masyarakat Miskin | Meningkatkan fasilitasi ketersediaan dan kemudahan pangan bagi masyarakat miskin | Tersedianya cadangan pangan daerah ekuivalen beras |
| Tujuan 2 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pangan | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian dan Perikanan | 1. Meningkatkan pembinaan, pelatihan, dan promosi pemasaran produk pertanian dan perikanan | 1. Meningkatkan fasilitasi promosi pemasaran, produk pertanian, perikanan dan hasil olahannya |
| | | 1. Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pengembangan usaha pertanian dan perikanan | 2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk menghasilkan produk pertanian dan perikanan yang memiliki nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi |

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung selama periode tahun 2019-2023 yang menjadi pelaksanaan dari tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan seperti tertuang pada Tabel 6.1. terdapat pada Program sebagai berikut :

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung Jawab | Lokasi | |
|-------------------------------|---|--------------------------|---|---|--|---|----------------------|---|----------------------|--|--|--|----------------------|--|----------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | | | Rp |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| Meningkatnya Ketahanan Pangan | Terpenuhinya Keterseediaan Pangan yang Aman dan Sehat | 2.0 9.0 3 | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Angka Kecukupan Energi (AKE) dengan ambang batas +/- 10% | 2148,3 kkal/kap/hari | Jumlah Cadangan Pangan Ekuivalen Beras 80 Ton | 2.415.064,4 64,00 | Jumlah Cadangan Pangan Ekuivalen Beras 80 Ton | 2.010.993,1 41,00 | Angka Kecukupan Energi (AKE) dengan ambang batas +/- 10%. 2100 kkal/kap/hari | 6.330.569,6 40,00 | Angka Kecukupan Energi (AKE) dengan ambang batas +/- 10%. 2100 kkal/kap/hari | 5.727.314,5 40,00 | Angka Kecukupan Energi (AKE) dengan ambang batas +/- 10%. 2100 kkal/kap/hari | 6.300.045,9 94,00 | Angka Kecukupan Energi (AKE) dengan ambang batas +/- 10%. 2100 kkal/kap/hari | 6.300.045,9 94,00 | DKPP | Kota Bandung |
| | | | | Angka Kecukupan Protein (AKP) dengan ambang batas +/- 10% | 66,70 gr/kap/hari | | | Angka Kecukupan Protein (AKP) dengan ambang batas +/- 10% 57 gr/kap/hari | | | Angka Kecukupan Protein (AKP) dengan ambang batas +/- 10% 57 gr/kap/hari | | | Angka Kecukupan Protein (AKP) dengan ambang batas +/- 10% 57 gr/kap/hari | | | DKPP | Kota Bandung | |
| | | | | Cakupan Masyarakat Miskin yang Pangannya Tercukupi | 0,98% | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsinya 84,26 | | Cakupan Masyarakat Miskin yang Pangannya Tercukupi 1,31% | | | Cakupan Masyarakat Miskin yang Pangannya Tercukupi 1,63% | | | Cakupan Masyarakat Miskin yang Pangannya Tercukupi 1,96% | | | Cakupan Masyarakat Miskin yang Pangannya Tercukupi 1,96% | | |
| | | 2.0 9.0 3.2. 01 | Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan pendampingan dan fasilitasi sarana pengembangan | - Laporan supply demand dan harga pangan 1 dokumen, Penyusunan Model Ketahanan Pangan Perkotaan 1 dokumen | n/a | Rumusan kebijakan Ketahanan Pangan 1 dokumen, Penyusunan kebijakan strategis dan gizi di Kota Bandung 1 dokumen | 348.000.214,00 | Rumusan kebijakan Ketahanan Pangan 1 dokumen, Penyusunan kebijakan strategis dan gizi di Kota Bandung 1 dokumen | 275.000.000,00 | - Laporan supply demand dan harga pangan 2 laporan - Dokumen Neraca Bahan Makanan 1 dokumen - Laporan pendampingan dan fasilitasi sarana pengembangan pangan lokal 1 laporan - Perjanjian kerja | 3.925.280,700,00 | - Laporan supply demand dan harga pangan 2 laporan - Dokumen Neraca Bahan Makanan 1 dokumen - Laporan pendampingan dan fasilitasi sarana pengembangan pangan lokal 1 laporan - Perjanjian kerja | 3.846.062,140,00 | - Laporan supply demand dan harga pangan 2 laporan - Dokumen Neraca Bahan Makanan 1 dokumen - Laporan pendampingan dan fasilitasi sarana pengembangan pangan lokal 1 laporan - Perjanjian kerja | 4.230.668,354,00 | - Laporan supply demand dan harga pangan 2 laporan - Dokumen Neraca Bahan Makanan 1 dokumen - Laporan pendampingan dan fasilitasi sarana pengembangan pangan lokal 1 laporan - Perjanjian kerja sama dan dokumentasi promosi pangan dan pertanian 1 dokumen | 4.230.668,354,00 | DKPP | Kota Bandung |

| | Pasokan dan Harga Pangan | ngan pangan lokal - Perjanjian kerja sama dan dokumentasi promosi pangan dan pertanian " | | | | dokumen | | sama dan dokumentasi promosi pangan dan pertanian 1 dokumen | | sama dan dokumentasi promosi pangan dan pertanian 1 dokumen | | sama dan dokumentasi promosi pangan dan pertanian 1 dokumen | | | | | |
|---------------------------------|--|---|---|---|----------------|--|----------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|------|--------------|
| 2.0 9.0 3.2. 01. 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | - Penyediaan informasi harga pangan - Penyusunan Neraca Bahan Makanan | n/a | Jumlah Pengadaan beras 60 ton | 839.999.000,00 | Jumlah Pengadaan beras 60 ton | 758.927.891,00 | - Penyediaan informasi harga pangan 1 dokumen - Penyusunan Neraca Bahan Makanan 1 dokumen | 195.288.500,00 | - Penyediaan informasi harga pangan 1 dokumen - Penyusunan Neraca Bahan Makanan 1 dokumen | 207.872.500,00 | - Penyediaan informasi harga pangan 1 dokumen - Penyusunan Neraca Bahan Makanan 1 dokumen | 228.659.750,00 | - Penyediaan informasi harga pangan 1 dokumen - Penyusunan Neraca Bahan Makanan 1 dokumen | 228.659.750,00 | DKPP | Kota Bandung |
| 2.0 9.0 3.2. 01. 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | - Pendampingan kelompok (Buruan Sae) - Sarana pengembangan pangan lokal (Buruan Sae) | Pendampingan kelompok (Buruan Sae) 194 kelompok | Jumlah Penyelenggaraan Penyuluhan Penganeka ragaman Konsumsi Pangan 7 kali, Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 dokumen | 699.804.450,00 | Jumlah Penyelenggaraan Penyuluhan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 7 kali, Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 dokumen | 549.804.450,00 | - Pendampingan kelompok (Buruan Sae) 60 kelompok - Sarana pengembangan pangan lokal (Buruan Sae) 40 kelompok | 3.393.178.700,00 | - Pendampingan kelompok (Buruan Sae) 40 kelompok - Sarana pengembangan pangan lokal (Buruan Sae) 40 kelompok | 2.935.511.140,00 | - Pendampingan kelompok (Buruan Sae) 40 kelompok - Sarana pengembangan pangan lokal (Buruan Sae) 40 kelompok | 3.229.062.254,00 | - Pendampingan kelompok (Buruan Sae) 140 kelompok - Sarana pengembangan pangan lokal (Buruan Sae) 120 kelompok | 3.229.062.254,00 | DKPP | Kota Bandung |
| 2.0 9.0 3.2. 01. 03 | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | - Fasilitasi promosi pangan - Fasilitasi kerjasama pangan - Pengadaan ATM Beras | n/a n/a - 18 unit | | | | | - Fasilitasi promosi pangan 2 kegiatan - Fasilitasi kerjasama pangan 1 dokumen - Pengadaan ATM Beras 6 unit | 310.643.500,00 | - Fasilitasi promosi pangan 2 kegiatan - Fasilitasi kerjasama pangan 1 dokumen | 423.976.500,00 | - Fasilitasi promosi pangan 2 kegiatan - Fasilitasi kerjasama pangan 1 dokumen | 466.374.150,00 | - Fasilitasi promosi pangan 2 kegiatan - Fasilitasi kerjasama pangan 1 dokumen - Pengadaan ATM Beras 6 unit | 466.374.150,00 | DKPP | Kota Bandung |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|--|-----|--|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|------|--------------|
| | | 2.0 9.0 3.2. 01. 04 | Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | - Rakor kesiapan menjelang HBKN - Sidak kesiapan menjelang HBKN | n/a | Penyusunan supply demand komoditi pangan strategis 1 dokumen, Laporan Monitoring harga pangan segar strategis 1 laporan, Rakor menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2 kali, ATM Beras 6 unit | 527.260.800,00 | Penyusunan supply demand komoditi pangan strategis 1 dokumen, Laporan Monitoring harga pangan segar strategis 1 laporan, Rakor menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2 kali, ATM Beras 6 unit, Warga miskin yang tidak mendapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 450 KK | 427.260.800,00 | - Rakor kesiapan menjelang HBKN 1 kali - Sidak kesiapan menjelang HBKN. 1 kali | 26.170.000,00 | - Rakor kesiapan menjelang HBKN 1 kali - Sidak kesiapan menjelang HBKN. 1 kali | 278.702.000,00 | - Rakor kesiapan menjelang HBKN 1 kali - Sidak kesiapan menjelang HBKN. 1 kali | 306.572.200,00 | - Rakor kesiapan menjelang HBKN 1 kali - Sidak kesiapan menjelang HBKN. 1 kali | 306.572.200,00 | DKPP | Kota Bandung |
| | | 2.0 9.0 3.2. 04 | Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Analisis evaluasi konsumsi pangan tahunan Kota Bandung | n/a | | | | | Analisis evaluasi konsumsi pangan tahunan Kota Bandung 1 dokumen | 851.168.940,00 | Analisis evaluasi konsumsi pangan tahunan Kota Bandung 1 dokumen | 828.457.400,00 | Analisis evaluasi konsumsi pangan tahunan Kota Bandung 1 dokumen | 911.303.140,00 | Analisis evaluasi konsumsi pangan tahunan Kota Bandung 3 dokumen | 911.303.140,00 | DKPP | Kota Bandung |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|---|------|--|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|------|--------------|
| | | 2.0 9.0 3.2. 04. 01 | Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | Penghitungan Skor PPH Konsumsi | 90,5 | | Penghitungan Skor PPH Konsumsi 1 dokumen | 0,00 | Penghitungan Skor PPH Konsumsi 1 dokumen | 0,00 | Penghitungan Skor PPH Konsumsi 1 dokumen | 0,00 | Penghitungan Skor PPH Konsumsi 3 dokumen | 0,00 | DKPP | Kota Bandung |
| | | 2.0 9.0 3.2. 04. 02 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | - Jumlah penyelenggaraan penyuluhan penganekaragaman konsumsi pangan - Pelatihan penanganan hasil produk pertanian - Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) | n/a | | - Jumlah penyelenggaraan penyuluhan penganekaragaman konsumsi pangan 7 kegiatan - Pelatihan penanganan hasil produk pertanian 10 kali - Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) 7 kelompok | 851.168.940,00 | - Jumlah penyelenggaraan penyuluhan penganekaragaman konsumsi pangan 7 kegiatan - Pelatihan penanganan hasil produk pertanian 10 kali - Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) 7 kelompok | 670.881.520,00 | - Jumlah penyelenggaraan penyuluhan penganekaragaman konsumsi pangan 7 kegiatan - Pelatihan penanganan hasil produk pertanian 10 kali - Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) 7 kelompok | 737.969.672,00 | - Jumlah penyelenggaraan penyuluhan penganekaragaman konsumsi pangan 21 kegiatan - Pelatihan penanganan hasil produk pertanian 30 kali - Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) 14 kelompok | 737.969.672,00 | DKPP | Kota Bandung |
| | | 2.0 9.0 3.2. 04. 03 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | Penghitungan tingkat konsumsi per kapita | n/a | | Penghitungan tingkat konsumsi per kapita 1 laporan | 0,00 | Penghitungan tingkat konsumsi per kapita 1 laporan | 157.575.880,00 | Penghitungan tingkat konsumsi per kapita 1 laporan | 173.333.468,00 | Penghitungan tingkat konsumsi per kapita 3 laporan | 173.333.468,00 | DKPP | Kota Bandung |
| Tersedianya Pangan Bagi Masyarakat Miskin | Terwujudnya Kecukupan Pangan Masyarakat Miskin | 2.0 9.0 3.2. 02 | Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Laporan penyaluran cadangan pangan Kota Bandung | n/a | | Laporan penyaluran cadangan pangan Kota Bandung 1 laporan | 1.554.120.000,00 | Laporan penyaluran cadangan pangan Kota Bandung 1 laporan | 1.052.795.000,00 | Laporan penyaluran cadangan pangan Kota Bandung 1 laporan | 1.158.074.500,00 | Laporan penyaluran cadangan pangan Kota Bandung 3 laporan | 1.158.074.500,00 | DKPP | Kota Bandung |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|--|--------|--|------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|---|------------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|
| | | 2.0 9.0 3.2. 02. 03 | Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota | Jumlah pengadaan beras | n/a | | | | Jumlah pengadaan beras 122,486 ton | 1.554.120.000,00 | Jumlah pengadaan beras 80 ton | 1.052.795.000,00 | Jumlah pengadaan beras 80 ton | 1.158.074.500,00 | Jumlah pengadaan beras 282,486 ton | 1.158.074.500,00 | DKPP | Kota Bandung | |
| | | 2.0 9.0 4 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Cakupan Informasi Daerah Rentan Pangan | n/a | | | Cakupan Informasi Daerah Rentan Pangan 100% | 22.550.000,00 | Cakupan Informasi Daerah Rentan Pangan 100% | 127.443.800,00 | Cakupan Informasi Daerah Rentan Pangan 100% | 140.188.180,00 | Cakupan Informasi Daerah Rentan Pangan 100% | 140.188.180,00 | DKPP | Kota Bandung | | |
| | | 2.0 9.0 4.2. 01 | Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | Analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan | n/a | | | Analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan 1 dokumen | 22.550.000,00 | Analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan 1 dokumen | 127.443.800,00 | Analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan 1 dokumen | 140.188.180,00 | Analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan 3 dokumen | 140.188.180,00 | DKPP | Kota Bandung | | |
| | | 2.0 9.0 4.2. 01. 01 | Sub Kegiatan Penyusunan , Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Peta ketahanan dan kerentanan pangan | n/a | | | Peta ketahanan dan kerentanan pangan 1 dokumen | 22.550.000,00 | Peta ketahanan dan kerentanan pangan 1 dokumen | 127.443.800,00 | Peta ketahanan dan kerentanan pangan 1 dokumen | 140.188.180,00 | Peta ketahanan dan kerentanan pangan 3 dokumen | 140.188.180,00 | DKPP | Kota Bandung | | |
| Meningkatnya Ketahanan Pangan | Terpenuhinya Keterseediaan Pangan yang Aman dan Sehat | 2.0 9.0 5 | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan | 99,93% | Pangan Segar yang Aman Dikonsumsi 91% | 2.949.999.029,00 | Pangan Segar yang Aman Dikonsumsi 92% | 2.456.426.278,00 | Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan 99,10% | 435.279.500,00 | Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan 99,20% | 361.126.583,00 | Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan 99,30% | 397.239.241,30 | Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan 99,30% | 397.239.241,30 | DKPP | Kota Bandung |
| | | 2.0 9.0 5.2. 01 | Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota | Laporan pengawasan pangan segar | n/a | Jumlah Pemeriksaan pangan segar hasil Peternakan di Pasar tradisional 33 lokasi, Jumlah Pemeriksaan pangan segar hasil Peternakan di pasar | 750.000.000,00 | Jumlah sampel pangan segar hasil peternakan yang diperiksa 3.400 sampel, Jumlah lokasi pemeriksaan | 600.000.000,00 | Laporan pengawasan pangan segar 1 laporan | 435.279.500,00 | Laporan pengawasan pangan segar 1 laporan | 361.126.583,00 | Laporan pengawasan pangan segar 1 laporan | 397.239.241,30 | Laporan pengawasan pangan segar 3 laporan | 397.239.241,30 | DKPP | Kota Bandung |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|-----|---|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|------|-----------------|
| | | | | modern 60 lokasi, Jumlah Pemeriksaan pangan segar hasil Peternakan di distributor 20 lokasi; Penyediaan sarana minilab food security hasil Peternakan 3 paket, Pemeriksaan Sampel di lab akreditasi 4 kali | | pangan segar hasil peternakan 113 lokasi, Penyediaan minilab food security hasil peternakan 3 paket, Pemeriksaan sampel di laboratorium terakreditasi 4 kali | | | | | | | | | | | |
| 2.0 9.0 5.2. 01. 03 | Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota | - Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil tanaman pangan dan hortikultura - Jumlah sampel pangan segar hasil tanaman pangan dan hortikultura yang diperiksa | n/a | Jumlah Pemeriksaan pangan segar hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura di Pasar tradisional 33 lokasi, Jumlah Pemeriksaan pangan segar hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura di pasar modern 60 lokasi, Jumlah Pemeriksaan pangan segar hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura di distributor 16 lokasi; Penyediaan sarana | 600.000.000 ,00 | Jumlah sampel pangan segar hasil tanaman pangan dan hortikultura yang diperiksa 2.200 sampel, Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil tanaman pangan dan hortikultura 109 lokasi, Penyediaan minilab food security hasil tanaman pangan dan | 500.000.000 ,00 | - Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil tanaman pangan dan hortikultura 109 lokasi - Jumlah sampel pangan segar hasil tanaman pangan dan hortikultura yang diperiksa 2200 sampel | 136.515.500 ,00 | - Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil tanaman pangan dan hortikultura 109 lokasi - Jumlah sampel pangan segar hasil tanaman pangan dan hortikultura yang diperiksa 2200 sampel | 110.426.583 ,00 | - Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil tanaman pangan dan hortikultura 109 lokasi - Jumlah sampel pangan segar hasil tanaman pangan dan hortikultura yang diperiksa 2200 sampel | 121.469.241 ,30 | - Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil tanaman pangan dan hortikultura 109 lokasi - Jumlah sampel pangan segar hasil tanaman pangan dan hortikultura yang diperiksa 6600 sampel | 121.469.241 ,30 | DKPP | Kota Bandung |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|--|--|--|---|---|----------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|--|---------------|------|--------------|
| | | | | | minilab food security hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura 3 paket, Pemeriksaan Sampel di lab akreditasi 4 kali | | hortikultura 3 paket, Pemeriksaan sampel di laboratorium terakreditasi 4 kali | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.0 9.0 5.2. 01. 04 | Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota | Pemeriksaan sampel di laboratorium terakreditasi | n/a | Jumlah Pemeriksaan pangan segar hasil Perikanan di Pasar tradisional 33 lokasi, Jumlah Pemeriksaan pangan segar hasil Perikanan di pasar modern 60 lokasi, Jumlah Pemeriksaan pangan segar hasil Perikanan di distributor 6 lokasi; Penyediaan sarana minilab food security hasil perikanan 3 paket, Pemeriksaan Sampel di lab akreditasi 4 kali | 600.000.000,00 | Jumlah sampel pangan segar hasil perikanan yang diperiksa 2.200 sampel, Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil perikanan 99 lokasi, Penyediaan minilab food security hasil perikanan 3 paket, Pemeriksaan sampel di laboratorium terakreditasi 4 kali | 500.000.000,00 | Pemeriksaan sampel di laboratorium terakreditasi 4 kali | 69.920.000,00 | Pemeriksaan sampel di laboratorium terakreditasi 4 kali | 51.600.000,00 | Pemeriksaan sampel di laboratorium terakreditasi 4 kali | 56.760.000,00 | Pemeriksaan sampel di laboratorium terakreditasi 12 kali | 56.760.000,00 | DKPP | Kota Bandung |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|-----|--|------------------|---|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|------|--------------|
| | | 2.0 9.0 5.2. 01. 05 | Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota | Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium tanaman pangan dan hortikultura | n/a | Jumlah hewan yang dipotong 46.626 ekor, Penyediaan peralatan Rumah potong hewan 3 paket, Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan sanitary 14 jenis, Pengangkutan limbah RPH 60 kali, Penyediaan bahan bakar minyak (untuk RPH Babi) 12.000 liter | 999.999.029,00 | Pemeriksaan daging segar hasil pemotongan hewan 40.000 sampel, Pengelolaan sanitary lingkungan RPH 2 lokasi, Penyediaan bahan bakar minyak (untuk RPH Babi) 6 paket | 856.426.278,00 | Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium tanaman pangan dan hortikultura 2 paket | 228.844.000,00 | Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium tanaman pangan dan hortikultura 2 paket | 199.100.000,00 | Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium tanaman pangan dan hortikultura 2 paket | 219.010.000,00 | Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium tanaman pangan dan hortikultura 6 paket | 219.010.000,00 | DKPP | Kota Bandung |
| Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pangan | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian dan Perikanan | 3.2 5.0 4 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Perikanan | n/a | a. Produktivitas Padi 68,08 kw/ha | 1.573.227.177,00 | a. Produktivitas Padi 68,22 kw/ha | 1.478.949.995,00 | Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Perikanan 42,43% | 1.235.516.990,00 | Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Perikanan 45,26% | 1.625.133.410,00 | Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Perikanan 48,10% | 1.787.646.751,00 | Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Perikanan 48,10% | 1.787.646.751,00 | DKPP | Kota Bandung |
| | | 3.2 5.0 4.2. 02 | Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil | Data pelaku usaha budidaya perikanan yang diberdayakan | n/a | Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 2 paket, Penyediaan Tanaman buah- | 799.978.700,00 | Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 2 paket, Penyediaan | 725.701.518,00 | Data pelaku usaha budidaya perikanan yang diberdayakan 1 laporan | 618.771.600,00 | Data pelaku usaha budidaya perikanan yang diberdayakan 1 laporan | 1.051.758.000,00 | Data pelaku usaha budidaya perikanan yang diberdayakan 1 laporan | 1.156.933.800,00 | Data pelaku usaha budidaya perikanan yang diberdayakan 1 laporan | 1.156.933.800,00 | DKPP | Kota Bandung |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|-----|---|--|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|------|---------------------|--|--|--|
| | | | | | buah 10.000 pohon, Penyediaa n Tanaman sayuran 100.000 pohon, Penyediaa n Tanaman hias 500 pohon. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 5.0 4.2. 02. 01 | Sub Kegiatan Pengembangan Kapabilitas Pembudi Daya Ikan Kecil | - Benih ikan konsumsi - Sarana prasarana perikanan | n/a | Jumlah Demplot padi 2 lokasi, Pelatihan budidaya tanaman pangan 1 kali, Pelatihan budidaya tanaman hias 1 kali, Penanggul angan hama dan penyakit tanaman 2 lokasi, Program Penghijaua n 1 kali, Panen Raya 1 kali. | 220.135.216 ,00 | Jumlah Demplot padi 2 lokasi, Pelatihan budidaya tanaman pangan 1 kali, Pelatihan budidaya tanaman hias 1 kali, Penanggu langan hama dan penyakit tanaman 2 lokasi, Program Penghijau an 1 kali, Panen Raya 1 kali. | 220.135.216 ,00 | - Benih ikan konsumsi 2 paket - Sarana prasarana perikanan 2 paket | 590.835.600 ,00 | - Benih ikan konsumsi 2 paket - Sarana prasarana perikanan 2 paket | 500.000.000 ,00 | - Benih ikan konsumsi 2 paket - Sarana prasarana perikanan 2 paket | 550.000.000 ,00 | - Benih ikan konsumsi 2 paket - Sarana prasarana perikanan 2 paket | 550.000.000 ,00 | DKPP | Kota Bandu ng | | | |
| 3.2 5.0 4.2. 02. 04 | Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahua n, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelengg araan Pendidikan | Pelatihan budidaya perikanan | n/a | Penyediaa n Bibit Tanaman Sayuran 50.000 pohon, Penyediaa n Bibit Tanaman Buah- buahan 500 pohon, Penyediaa n pakan ternak | 553.113.261 ,00 | Penyedia an Bibit Tanaman Sayuran 50.000 pohon, Penyedia an Bibit Tanaman Buah- buahan 500 pohon, Penyedia an pakan ternak | 533.113.261 ,00 | Pelatihan budidaya perikanan 10 kali | 27.936.000, 00 | Pelatihan budidaya perikanan 10 kali | 551.758.000 ,00 | Pelatihan budidaya perikanan 10 kali | 606.933.800 ,00 | Pelatihan budidaya perikanan 10 kali | 606.933.800 ,00 | DKPP | Kota Bandu ng | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|-----|--|----------------|--|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|------|--------------|
| | dan Pelatihan | | | 14.000 kg, Pembinaan kelompok tani padi di lahan sawah abadi 4 kali, Pelatihan perbenihan/perbibitan 5 kali, Pelatihan hidroponik 5 kali, Pelatihan budidaya ternak puyuh 2 kali | | 14.000 kg, Pembinaan kelompok tani padi di lahan sawah abadi 6 kali, Pelatihan perbenihan/perbibitan 5 kali, Pelatihan hidroponik 5 kali, Pelatihan budidaya ternak puyuh 2 kali | | | | | | | | | | | |
| 3.2 5.0 4.2. 04 | Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Data pelaku usaha budidaya perikanan yang diberdayakan | n/a | Meningkatnya Mutu Bahan Baku Tembakau Sesuai Kebutuhan Industri 100% | 379.999.840,00 | Persentase Kualitas Bahan Baku Tembakau 100% | 316.420.983,00 | Data pelaku usaha budidaya perikanan yang diberdayakan 1 laporan | 616.745.390,00 | Data pelaku usaha budidaya perikanan yang diberdayakan 1 laporan | 573.375.410,00 | Data pelaku usaha budidaya perikanan yang diberdayakan 1 laporan | 630.712.951,00 | Data pelaku usaha budidaya perikanan yang diberdayakan 3 laporan | 630.712.951,00 | DKPP | Kota Bandung |
| 3.2 5.0 4.2. 03 | Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | - Benih ikan hias - Benih ikan Mas - Benih ikan nila' - Pakan ikan konsumsi dan ikan hias - Peralatan Ikan Konsumsi dan Ikan Hias | n/a | Uji laboratorium kualitas tembakau 4 kali, Workshop kelembagaan petani tembakau 2 kali, Pelatihan penanganan pasca panen tembakau 1 kali, Pemagangan petani tembakau 8 orang, Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman | 379.999.840,00 | Uji laboratorium kualitas tembakau 4 kali, Workshop kelembagaan petani tembakau 2 kali, Pelatihan penanganan pasca panen tembakau 1 kali, Pemagangan petani tembakau 8 orang, Sekolah Lapang | 316.420.983,00 | - Benih ikan hias 100000 ekor - Benih ikan Mas 100000 ekor - Benih ikan nila' 250000 ekor - Pakan ikan konsumsi dan ikan hias 2 paket - Peralatan Ikan Konsumsi dan Ikan Hias 2 paket | 584.295.390,00 | - Benih ikan hias 100000 ekor - Benih ikan Mas 100000 ekor - Benih ikan nila' 250000 ekor - Pakan ikan konsumsi dan ikan hias 2 paket - Peralatan Ikan Konsumsi dan Ikan Hias 2 paket | 540.925.410,00 | - Benih ikan hias 100000 ekor - Benih ikan Mas 100000 ekor - Benih ikan nila' 250000 ekor - Pakan ikan konsumsi dan ikan hias 2 paket - Peralatan Ikan Konsumsi dan Ikan Hias 2 paket | 595.017.951,00 | - Benih ikan hias 300000 ekor - Benih ikan Mas 300000 ekor - Benih ikan nila' 750000 ekor - Pakan ikan konsumsi dan ikan hias 6 paket - Peralatan Ikan Konsumsi dan Ikan Hias 6 paket | 595.017.951,00 | DKPP | Kota Bandung |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|-----|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|------|--------------|
| | | | | Terpadu (SLPTT) tembakau 2 kali | | Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) tembakau 2 kali | | | | | | | | | | | |
| 3.2 5.0 4.2. 04. 04 | Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Penyediaan obat ikan | n/a | | | | | Penyediaan obat ikan 1 paket | 32.450.000,00 | Penyediaan obat ikan 1 paket | 32.450.000,00 | Penyediaan obat ikan 1 paket | 35.695.000,00 | Penyediaan obat ikan 3 paket | 35.695.000,00 | DKPP | Kota Bandung |
| 3.2 5.0 6 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | - Persentase Binaan yang menjadi Pelaku Usaha Pangan Olahan Hasil Perikanan - Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Hasil Perikanan | n/a | Populasi Ternak Domba 36.756 ekor | 787.240.176,00 | Populasi Ternak Domba 37.829 ekor | 655.524.777,00 | - Persentase Binaan yang menjadi Pelaku Usaha Pangan Olahan Hasil 5% Perikanan - Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Hasil Perikanan 99,10% | 462.902.060,00 | - Persentase Binaan yang menjadi Pelaku Usaha Pangan Olahan Hasil 7% Perikanan - Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Hasil Perikanan 99,20% | 627.507.163,00 | - Persentase Binaan yang menjadi Pelaku Usaha Pangan Olahan Hasil 9% Perikanan - Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Hasil Perikanan 99,30% | 690.257.879,30 | - Persentase Binaan yang menjadi Pelaku Usaha Pangan Olahan Hasil 9% Perikanan - Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Hasil Perikanan 99,30% | 690.257.879,30 | DKPP | Kota Bandung |
| 3.2 5.0 6.2. 01 | Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | Data pelaku usaha pengolahan hasil perikanan | n/a | Penyediaan ternak domba 40 ekor, Penyediaan ternak kambing 18 ekor, Peralatan dan mesin peternakan 8 jenis | 482.288.560,00 | Penyediaan ternak domba 40 ekor, Penyediaan ternak kambing 18 ekor, Peralatan dan mesin peternakan 8 jenis | 400.573.161,00 | Data pelaku usaha pengolahan hasil perikanan 1 laporan | 65.452.060,00 | Data pelaku usaha pengolahan hasil perikanan 1 laporan | 262.516.163,00 | Data pelaku usaha pengolahan hasil perikanan 1 laporan | 288.767.779,30 | Data pelaku usaha pengolahan hasil perikanan 3 laporan | 288.767.779,30 | DKPP | Kota Bandung |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-----|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|--|----------------|------|--------------|
| | | 3.2 5.0 6.2. 01. 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | - Pelatihan olahan hasil perikanan - Pelatihan kemasan hasil perikanan - Pendampingan pelaku usaha perikanan - Pendataan pelaku pemasaran dan pengolahan hasil perikanan | n/a | Jumlah Demplot peternakan 2 lokasi, Jumlah Pelatihan budidaya ternak 12 kali, Lomba kelompok ternak 1 kali | 304.951.616,00 | Demplot peternakan 2 lokasi, Pelatihan budidaya ternak 12 kali, Lomba kelompok ternak 1 kali | 254.951.616,00 | - Pelatihan olahan hasil perikanan 5 kali - Pelatihan kemasan hasil perikanan 5 kali - Pendampingan pelaku usaha perikanan 1 kali - Pendataan pelaku usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan 24 kali | 65.452.060,00 | - Pelatihan olahan hasil perikanan 5 kali - Pelatihan kemasan hasil perikanan 5 kali - Pendampingan pelaku usaha perikanan 1 kali - Pendataan pelaku usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan 24 kali | 262.516.163,00 | - Pelatihan olahan hasil perikanan 5 kali - Pelatihan kemasan hasil perikanan 5 kali - Pendampingan pelaku usaha perikanan 1 kali - Pendataan pelaku usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan 24 kali | 288.767.779,30 | - Pelatihan olahan hasil perikanan 15 kali - Pelatihan kemasan hasil perikanan 15 kali - Pendampingan pelaku usaha perikanan 3 kali - Pendataan pelaku usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan 24 kali | 288.767.779,30 | DKPP | Kota Bandung |
| Meningkatnya Ketahanan Pangan | Terpenuhinya Keterseediaan Pangan yang Aman dan Sehat | 3.2 5.0 6.2. 02 | Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Laporan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran | n/a | Produksi Ikan Konsumsi 2.970 ton | 299.993.610,00 | Produksi Ikan Konsumsi 2.970,5 ton | 266.148.305,00 | Laporan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran 1 laporan | 397.450.000,00 | Laporan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran 1 laporan | 364.991.000,00 | Laporan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran 1 laporan | 401.490.100,00 | Laporan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran 3 laporan | 401.490.100,00 | DKPP | Kota Bandung |
| | | 3.2 5.0 6.2. 02. 01 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | - Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil perikanan - Jumlah sampel pangan segar hasil perikanan yang diperiksa - Pemeriksaan sampel di laboratorium terakreditasi - | n/a | Jumlah Demplot ikan konsumsi dan ikan hias 6 lokasi, Pelatihan budidaya perikanan 6 kali, Pencegahan dan pengobatan hama penyakit ikan 6 kali | 299.993.610,00 | Jumlah Demplot ikan konsumsi dan ikan hias 6 lokasi, Pelatihan budidaya perikanan 6 kali, Pencegahan dan pengobatan hama penyakit ikan 6 kali | 266.148.305,00 | - Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil perikanan 99 lokasi - Jumlah sampel pangan segar hasil perikanan yang diperiksa 2200 sampel - Pemeriksaan sampel di laboratorium terakreditasi 4 kali - Penyediaan sarana mini lab food security hasil perikanan 2 paket | 397.450.000,00 | - Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil perikanan 99 lokasi - Jumlah sampel pangan segar hasil perikanan yang diperiksa 2200 sampel - Pemeriksaan sampel di laboratorium terakreditasi 4 kali - Penyediaan sarana mini lab food security hasil perikanan 2 paket | 364.991.000,00 | - Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil perikanan 99 lokasi - Jumlah sampel pangan segar hasil perikanan yang diperiksa 2200 sampel - Pemeriksaan sampel di laboratorium terakreditasi 4 kali - Penyediaan sarana mini lab food security hasil perikanan 2 paket | 401.490.100,00 | - Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil perikanan 99 lokasi - Jumlah sampel pangan segar hasil perikanan yang diperiksa 6600 sampel - Pemeriksaan sampel di laboratorium terakreditasi 12 kali - Penyediaan sarana mini lab food security hasil perikanan 6 paket | 401.490.100,00 | DKPP | Kota Bandung |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|-----|--|------------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|------|--------------|
| | | | | Penyediaan sarana mini lab food security hasil perikanan | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pangan | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian dan Perikanan | 3.2 7.0 2 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAANGAN SARANA PERTANIAN | Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Pangan dan Peternakan | n/a | Jumlah maksimum kasus penyakit zoonosa 7 kasus | 1.184.637.395,00 | Jumlah maksimum kasus penyakit zoonosa 7 kasus | 986.432.334,00 | Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Pangan Pertanian dan Peternakan 65% | 2.978.816.202,00 | Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Pangan Pertanian dan Peternakan 75% | 2.319.521.591,00 | Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Pangan Pertanian dan Peternakan 85% | 2.551.473.750,10 | Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Pangan Pertanian dan Peternakan 85% | 2.551.473.750,10 | DKPP | Kota Bandung |
| | | 3.2 7.0 2.2. 01 | Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Laporan jumlah petani yang difasilitasi sarana pertanian | n/a | | | | | Laporan jumlah petani yang difasilitasi sarana pertanian 1 laporan | 418.932.760,00 | Laporan jumlah petani yang difasilitasi sarana pertanian 1 laporan | 645.809.000,00 | Laporan jumlah petani yang difasilitasi sarana pertanian 1 laporan | 710.389.900,00 | Laporan jumlah petani yang difasilitasi sarana pertanian 3 laporan | 710.389.900,00 | DKPP | Kota Bandung |
| | | 3.2 7.0 2.2. 01. 01 | Sub Kegiatan Pengawasan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | - Pengujian mutu pupuk dan pestisida di lab terakreditasi di lab terakreditasi uji sampel - Rapat koordinasi dan evaluasi pemanfaatan alat mesin pertanian - Rapat koordinasi dan evaluasi pengawasan dan peredaran pupuk dan pestisida di Kota Bandung | n/a | Jumlah kegiatan vaksinasi dan pengobatan hewan dan ternak 2 kali, Penyediaan peralatan kesehatan hewan 7 jenis, Penyediaan obat hewan, vaksin dan vitamin 20 jenis | 606.332.332,00 | Penyediaan peralatan kesehatan hewan 7 jenis, Penyediaan obat hewan, vaksin dan vitamin 20 jenis | 456.127.271,00 | - Pengujian mutu pupuk dan pestisida di lab terakreditasi uji sampel 10 lokasi - Rapat koordinasi dan evaluasi pemanfaatan alat mesin pertanian 1 kali - Rapat koordinasi dan evaluasi pengawasan dan peredaran pupuk dan pestisida di Kota Bandung 1 kali | 42.189.600,00 | - Pengujian mutu pupuk dan pestisida di lab terakreditasi uji sampel 10 lokasi - Rapat koordinasi dan evaluasi pemanfaatan alat mesin pertanian 1 kali - Rapat koordinasi dan evaluasi pengawasan dan peredaran pupuk dan pestisida di Kota Bandung 1 kali | 10.252.000,00 | - Pengujian mutu pupuk dan pestisida di lab terakreditasi uji sampel 10 lokasi - Rapat koordinasi dan evaluasi pemanfaatan alat mesin pertanian 1 kali - Rapat koordinasi dan evaluasi pengawasan dan peredaran pupuk dan pestisida di Kota Bandung 1 kali | 11.277.200,00 | - Pengujian mutu pupuk dan pestisida di lab terakreditasi uji sampel 10 lokasi - Rapat koordinasi dan evaluasi pemanfaatan alat mesin pertanian 3 kali - Rapat koordinasi dan evaluasi pengawasan dan peredaran pupuk dan pestisida di Kota Bandung 3 kali | 11.277.200,00 | DKPP | Kota Bandung |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|---|-----|--|----------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|---|------------------|------|--------------|
| | | 3.2 7.0 2.2. 01. 02 | Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | - Pelatihan pemberian pupuk berimbang - - Penyediaan tanaman produktif - Rapat penyusunan RDKK pupuk bersubsidi - - Sosialisasi penerapan kartu tani | n/a | Jumlah Pemeriksaan dan pengobatan kesehatan hewan 6.500 ekor, Penyediaan obat hewan 8 jenis, Penyediaan peralatan kesehatan hewan 5 jenis. | 578.305.063,00 | Jumlah Pemeriksaan dan pengobatan kesehatan hewan 6.500 ekor, Penyediaan obat hewan 2 paket, Penyediaan peralatan kesehatan hewan 2 paket. | 530.305.063,00 | - Pelatihan pemberian pupuk berimbang 2 kali - Penyediaan tanaman produktif 8000 pohon - Rapat penyusunan RDKK pupuk bersubsidi 2 kali - Sosialisasi penerapan kartu tani 2 kali | 376.743.160,00 | - Pelatihan pemberian pupuk berimbang 2 kali - Penyediaan tanaman produktif 8000 pohon - Rapat penyusunan RDKK pupuk bersubsidi 2 kali - Sosialisasi penerapan kartu tani 2 kali | 635.557.000,00 | - Pelatihan pemberian pupuk berimbang 2 kali - Penyediaan tanaman produktif 8000 pohon - Rapat penyusunan RDKK pupuk bersubsidi 2 kali - Sosialisasi penerapan kartu tani 2 kali | 699.112.700,00 | - Pelatihan pemberian pupuk berimbang 6 kali - Penyediaan tanaman produktif 24000 pohon - Rapat penyusunan RDKK pupuk bersubsidi 6 kali - Sosialisasi penerapan kartu tani 6 kali | 699.112.700,00 | DKPP | Kota Bandung |
| | | 3.2 7.0 2.2. 02 | Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kab/ Kota | Laporan produksi dan distribusi bibit tanaman dan ternak | n/a | Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Perikanan 80 orang | 499.997.263,00 | Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Perikanan 90 orang | 416.341.295,00 | Laporan produksi dan distribusi bibit tanaman dan ternak 1 laporan | 1.448.419.392,00 | Laporan produksi dan distribusi bibit tanaman dan ternak 1 laporan | 1.319.671.671,00 | Laporan produksi dan distribusi bibit tanaman dan ternak 1 laporan | 1.451.638.838,10 | Laporan produksi dan distribusi bibit tanaman dan ternak 3 laporan | 1.451.638.838,10 | DKPP | Kota Bandung |
| | | 3.2 7.0 2.2. 02. 03 | Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | - Pembinaan kelompok tani lahan sawah abadi - - Penyediaan bibit tanaman obat keluarga - - Penyediaan bibit tanaman hias - - Penyediaan bibit tanaman sayuran - - Penyediaan DOC ayam | n/a | Jumlah Pelatihan pengolahan dan pengemasan hasil perikanan 120 orang, Pameran ikan hias 2 kali, Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha perikanan 6 kali, Peralatan olahan hasil perikanan 4 paket | 499.997.263,00 | Jumlah Pelatihan pengolahan dan pengemasan hasil perikanan 125 orang, Pameran ikan hias 2 kali, Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha perikanan 6 kali, Peralatan olahan hasil perikanan 4 paket | 416.341.295,00 | - Pembinaan kelompok tani lahan sawah abadi 4 kelompok- - Penyediaan bibit tanaman obat keluarga 8000 pohon - Penyediaan bibit tanaman hias 3500 pohon - Penyediaan bibit tanaman sayuran 70000 pohon - Penyediaan DOC ayam 12500 ekor | 1.448.419.392,00 | - Pembinaan kelompok tani lahan sawah abadi 4 kelompok- - Penyediaan bibit tanaman obat keluarga 8000 pohon - Penyediaan bibit tanaman hias 3500 pohon - Penyediaan bibit tanaman sayuran 70000 pohon - Penyediaan DOC ayam 12500 ekor | 1.319.671.671,00 | - Pembinaan kelompok tani lahan sawah abadi 4 kelompok- - Penyediaan bibit tanaman obat keluarga 8000 pohon - Penyediaan bibit tanaman hias 3500 pohon - Penyediaan bibit tanaman sayuran 70000 pohon - Penyediaan DOC ayam 12500 ekor | 1.451.638.838,10 | - Pembinaan kelompok tani lahan sawah abadi 4 kelompok- - Penyediaan bibit tanaman obat keluarga 24000 pohon - Penyediaan bibit tanaman hias 10500 pohon - Penyediaan bibit tanaman sayuran 210000 pohon - Penyediaan DOC ayam 37500 ekor | 1.451.638.838,10 | DKPP | Kota Bandung |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|-----|---|----------------|---|----------------|---|------------------|---|----------------|---|----------------|--|----------------|------|--------------|
| | | 3.2 7.0 2.2. 05 | Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Data peternak dan populasi ternak | n/a | Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Peternakan 80 orang | 517.573.670,00 | Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Peternakan 90 orang | 430.976.943,00 | Data peternak dan populasi ternak 1 laporan | 82.009.050,00 | Data peternak dan populasi ternak 1 laporan | 288.922.720,00 | Data peternak dan populasi ternak 1 laporan | 317.814.992,00 | Data peternak dan populasi ternak 3 laporan | 317.814.992,00 | DKPP | Kota Bandung |
| | | 3.2 7.0 2.2. 05. 06 | Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | - Demplot peternakan - Pelatihan budidaya ternak | n/a | Jumlah Pelatihan pengolahan dan pengemasan hasil peternakan 180 orang, Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha peternakan 3 kali, kontes ternak dan lomba olahan 3 kali, Peralatan olahan hasil peternakan 10 paket | 517.573.670,00 | Jumlah Pelatihan pengolahan dan pengemasan hasil peternakan 180 orang, Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha peternakan 3 kali, kontes ternak dan lomba olahan 3 kali, Peralatan olahan hasil peternakan 10 paket | 430.976.943,00 | - Demplot peternakan 2 lokasi - Pelatihan budidaya ternak 5 kali | 82.009.050,00 | - Demplot peternakan 2 lokasi - Pelatihan budidaya ternak 5 kali | 288.922.720,00 | - Demplot peternakan 2 lokasi - Pelatihan budidaya ternak 5 kali | 317.814.992,00 | - Demplot peternakan 6 lokasi - Pelatihan budidaya ternak 15 kali | 317.814.992,00 | DKPP | Kota Bandung |
| | | 3.2 7.0 2.2. 06 | Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah | Data peternak dan populasi ternak | n/a | Jumlah kelompok masyarakat di bidang pangan, pertanian dan perikanan yang diberdayakan 45 kelompok | 809.346.641,00 | Jumlah kelompok masyarakat di bidang pangan, pertanian dan perikanan yang diberdayakan | 822.840.188,00 | Data peternak dan populasi ternak 1 laporan | 1.029.455.000,00 | Data peternak dan populasi ternak 1 laporan | 65.118.200,00 | Data peternak dan populasi ternak 1 laporan | 71.630.020,00 | Data peternak dan populasi ternak 3 laporan | 71.630.020,00 | DKPP | Kota Bandung |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|-----|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|------|---------------------|
| | Kabupaten/ Kota Lain | | | | | akan 48 kelompo k | | | | | | | | | | | |
| 3.2 7.0 2.2. 06. 01 | Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain | - Alat pemelihara an ternak - Bibit ternak ayam - Bibit ternak sapi | n/a | Jumlah fasilitasi kerjasama Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan 2 kelompok, Pelaksana an fasilitasi penyusuna n naskah kerjasama 1 dokumen, Pelaksana an pameran (lokal/regi onal/nasio nal) 3 kali | 499.999.383 ,00 | Jumlah fasilitasi kerjasam a Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan 2 kelompok , Pelaksana an fasilitasi penyusun an naskah kerjasam a 1 dokumen, Pelaksana an pameran (lokal/reg ional/nasi onal) 3 kali | 573.429.928 ,00 | - Alat pemeliharaan ternak 2 jenis - Bibit ternak ayam 61 ekor - Bibit ternak sapi 6 ekor | 162.330.000 ,00 | - Alat pemeliharaan ternak 2 jenis - Bibit ternak ayam 61 ekor - Bibit ternak sapi 6 ekor | 0,00 | - Alat pemeliharaan ternak 2 jenis - Bibit ternak ayam 61 ekor - Bibit ternak sapi 6 ekor | 0,00 | - Alat pemeliharaan ternak 2 jenis - Bibit ternak ayam 183 ekor - Bibit ternak sapi 18 ekor | 0,00 | DKPP | Kota Bandu ng |
| 3.2 7.0 2.2. 06. 02 | Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain | - Bibit tanaman - Pakan ternak - Peralatan pertanian | n/a | Jumlah Penyeleng garaan Penyuluh an Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan 12 kelompok, Jumlah Pembinaa n kelompok tani 3 kelompok, Pelaksana an mimbar saresehan 1 kali, Pelaksana an Hari Krida Pertanian 1 kali. | 309.347.258 ,00 | Penyelen garaan Penyuluh an Bidang Pangan Pertanian dan Perikanan 12 kelompok , pembinaa n kelompok tani 3 kelompok , temu tani 5 kali, temu teknis 5 kali, programa penyuluh 1 kali, sekolah lapang padi 16 kali, | 249.410.260 ,00 | - Bibit tanaman 3 jenis - Pakan ternak 3 jenis - Peralatan pertanian 7 jenis | 867.125.000 ,00 | - Bibit tanaman 3 jenis - Pakan ternak 3 jenis - Peralatan pertanian 7 jenis | 65.118.200, 00 | - Bibit tanaman 3 jenis - Pakan ternak 3 jenis - Peralatan pertanian 7 jenis | 71.630.020, 00 | - Bibit tanaman 3 jenis - Pakan ternak 3 jenis - Peralatan pertanian 7 jenis | 71.630.020, 00 | DKPP | Kota Bandu ng |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|--|-----|--|----------------------|--|---|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|------|---------------------|
| | | | | | | | | sekolah lapang sayuran 16 kali | | | | | | | | | | |
| | 3.2 7.0 3 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN PRASARAN A PERTANIAN | Persentas e Petani yang Mengikuti Asuransi Usaha Tani Padi | n/a | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% | 3.323.862.6 04,00 | Cakupan Pelayana n Administrasi Perkanto ran 100% | 3.277.575.8 83,00 | Persentase Petani yang Mengikuti Asuransi Usaha Tani Padi 5% | 159.779.180 ,00 | Persentase Petani yang Mengikuti Asuransi Usaha Tani Padi 10% | 214.008.500 ,00 | Persentase Petani yang Mengikuti Asuransi Usaha Tani Padi 15% | 235.409.350 ,00 | Persentase Petani yang Mengikuti Asuransi Usaha Tani Padi 15% | 235.409.350 ,00 | DKPP | Kota Bandu ng |
| | 3.2 7.0 3.2. 01 | Kegiatan Pengemban gan Prasarana Pertanian | Data petani yang mengikuti asuransi | n/a | Jumlah laporan bulanan penyediaa n jasa komunika si, air, dan listrik 12 laporan | 800.022.800 ,00 | Jumlah laporan bulanan penyediaa n jasa komunik asi, air, dan listrik 12 laporan | 800.022.800 ,00 | Data petani yang mengikuti asuransi 1 laporan | 159.779.180 ,00 | Data petani yang mengikuti asuransi 1 laporan | 214.008.500 ,00 | Data petani yang mengikuti asuransi 1 laporan | 235.409.350 ,00 | Data petani yang mengikuti asuransi 3 laporan | 235.409.350 ,00 | DKPP | Kota Bandu ng |
| | 3.2 7.0 3.2. 01. 02 | Sub Kegiatan Penyusunan Peta Lahan Pertanian pangan Berkelanjut an/LP2B | Kajian penyusuna n peta lahan pertanian pangan berkekanj utan | n/a | Jumlah laporan bulanan penyediaa n jasa peralatan dan perlengka pan kantor 12 laporan | 90.059.200, 00 | Jumlah laporan bulanan penyediaa n jasa peralatan dan perlengka pan kantor 12 laporan | 80.000.000, 00 | Kajian penyusunan peta lahan pertanian pangan berkekanjutan 1 dokumen | 159.779.180 ,00 | Kajian penyusunan peta lahan pertanian pangan berkekanjutan 1 dokumen | 204.176.500 ,00 | Kajian penyusunan peta lahan pertanian pangan berkekanjutan 1 dokumen | 224.594.150 ,00 | Kajian penyusunan peta lahan pertanian pangan berkekanjutan 3 dokumen | 224.594.150 ,00 | DKPP | Kota Bandu ng |
| | 3.2 7.0 3.2. 01. 03 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | - Rapat koordinasi asuransi usaha tani padi (AUTP) - Rapat pembiyaa n usaha tani | n/a | Jumlah laporan bulanan penyediaa n jasa kebersihan kantor 12 laporan | 416.433.600 ,00 | Jumlah laporan bulanan penyediaa n jasa kebersiha n kantor 12 laporan | 390.574.800 ,00 | - Rapat koordinasi asuransi usaha tani padi (AUTP) 1 kali - Rapat pembiayaan usaha tani 3 kali | 0,00 | - Rapat koordinasi asuransi usaha tani padi (AUTP) 1 kali - Rapat pembiayaan usaha tani 3 kali | 9.832.000,0 0 | - Rapat koordinasi asuransi usaha tani padi (AUTP) 1 kali - Rapat pembiayaan usaha tani 3 kali | 10.815.200, 00 | - Rapat koordinasi asuransi usaha tani padi (AUTP) 3 kali - Rapat pembiayaan usaha tani 9 kali | 10.815.200, 00 | DKPP | Kota Bandu ng |
| Meningka tanya Ketahan an Pangan | 3.2 7.0 4 | PROGRAM PENGENDA LIAN KESEHATA N HEWAN DAN KESEHATA N MASYARAK AT VETERINER | - Cakupan Penangan an Kasus Penyakit Zoonosa - Persentas e Binaan yang menjadi Pelaku Usaha Pangan Olahan | n/a | Jumlah laporan bulanan penyediaa n alat tulis kantor 12 laporan | 260.012.840 ,00 | Jumlah laporan bulanan penyediaa n alat tulis kantor 12 laporan | 260.012.840 ,00 | - Cakupan Penanganan Kasus Penyakit Zoonosa 100% - Persentase Binaan yang menjadi Pelaku Usaha Pangan Olahan Hasil Peternakan 5% - Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Hasil Peternakan | 2.652.462.5 27,00 | - Cakupan Penanganan Kasus Penyakit Zoonosa 100% - Persentase Binaan yang menjadi Pelaku Usaha Pangan Olahan Hasil Peternakan 7% - Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Hasil Peternakan | 2.966.057.2 55,00 | - Cakupan Penanganan Kasus Penyakit Zoonosa 100% - Persentase Binaan yang menjadi Pelaku Usaha Pangan Olahan Hasil Peternakan 9% - Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Hasil Peternakan | 3.262.662.9 80,50 | - Cakupan Penanganan Kasus Penyakit Zoonosa 100% - Persentase Binaan yang menjadi Pelaku Usaha Pangan Olahan Hasil Peternakan 9% - Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Hasil Peternakan 99,30% | 3.262.662.9 80,50 | DKPP | Kota Bandu ng |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|---|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|------|--------------|
| | | | Hasil Peternakan - Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Hasil Peternakan | | | | | 99,10% | | 99,20% | | 99,30% | | | | | |
| 3.2 7.0 4.2. 01 | Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Laporan penanganan dan pengendalian kasus penyakit zoonosa | n/a | Jumlah laporan bulanan pengaduan cetakan dan penggantian 12 laporan | 220.000.000,00 | Jumlah laporan bulanan pengaduan cetakan dan penggantian 12 laporan | 220.000.000,00 | Laporan penanganan dan pengendalian kasus penyakit zoonosa 1 laporan | 454.349.170,00 | Laporan penanganan dan pengendalian kasus penyakit zoonosa 1 laporan | 518.898.350,00 | Laporan penanganan dan pengendalian kasus penyakit zoonosa 1 laporan | 570.788.185,00 | Laporan penanganan dan pengendalian kasus penyakit zoonosa 3 laporan | 570.788.185,00 | DKPP | Kota Bandung |
| 3.2 7.0 4.2. 01. 01 | Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | - Penyediaan obat hewan, vaksin, dan vitamin - Penyediaan peralatan kesehatan hewan | n/a | Jumlah laporan bulanan penyediaan komponen instalasi listrik/penyerangan 12 laporan | 100.021.785,00 | Jumlah laporan bulanan penyediaan komponen instalasi listrik/penyerangan 12 laporan | 80.023.964,00 | - Penyediaan obat hewan, vaksin, dan vitamin 20 jenis - Penyediaan peralatan kesehatan hewan 7 jenis | 185.604.770,00 | - Penyediaan obat hewan, vaksin, dan vitamin 20 jenis - Penyediaan peralatan kesehatan hewan 7 jenis | 148.299.250,00 | - Penyediaan obat hewan, vaksin, dan vitamin 20 jenis - Penyediaan peralatan kesehatan hewan 7 jenis | 163.129.175,00 | - Penyediaan obat hewan, vaksin, dan vitamin 20 jenis - Penyediaan peralatan kesehatan hewan 7 jenis | 163.129.175,00 | DKPP | Kota Bandung |
| 3.2 7.0 4.2. 01. 02 | Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | - Penyediaan vaksin - Surveilans penyakit | n/a | Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 laporan | 174.921.299,00 | Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 laporan | 174.921.299,00 | - Penyediaan vaksin 1 paket - Surveilans penyakit 12 kali | 235.282.400,00 | - Penyediaan vaksin 1 paket - Surveilans penyakit 12 kali | 290.247.100,00 | - Penyediaan vaksin 1 paket - Surveilans penyakit 12 kali | 319.271.810,00 | - Penyediaan vaksin 3 paket - Surveilans penyakit 36 kali | 319.271.810,00 | DKPP | Kota Bandung |
| 3.2 7.0 4.2. 01. 03 | Sub Kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit | - Pengobatan, desinfeksi - Sosialisasi PHMS | n/a | Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan rumah tangga 12 | 60.012.480,00 | Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan rumah tangga 12 | 60.012.480,00 | - Pengobatan, desinfeksi 1 paket - Sosialisasi PHMS 10 kali | 33.462.000,00 | - Pengobatan, desinfeksi 1 paket - Sosialisasi PHMS 10 kali | 80.352.000,00 | - Pengobatan, desinfeksi 1 paket - Sosialisasi PHMS 10 kali | 88.387.200,00 | - Pengobatan, desinfeksi 3 paket - Sosialisasi PHMS 30 kali | 88.387.200,00 | DKPP | Kota Bandung |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|-----|--|----------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|------|--------------|
| | Hewan Menular | | | laporan | | laporan | | | | | | | | | | | |
| 3.2 7.0 4.2. 02 | Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | Laporan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan RPH | n/a | Jumlah laporan bulanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-g-undangan 12 laporan | 35.371.600,00 | Jumlah laporan bulanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-g-undangan 12 laporan | 30.000.000,00 | Laporan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan RPH 1 laporan | 1.100.524.876,00 | Laporan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan RPH 1 laporan | 1.107.131.846,00 | Laporan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan RPH 1 laporan | 1.217.845.030,60 | Laporan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan RPH 3 laporan | 1.217.845.030,60 | DKPP | Kota Bandung |
| 3.2 7.0 4.2. 02. 02 | Sub Kegiatan Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | Pemeriksaan ante mortem dan post mortem hewan yang dipotong di RPH | n/a | Jumlah laporan bulanan kegiatan penyediaan makanan dan minuman 12 laporan | 150.007.000,00 | Jumlah laporan bulanan kegiatan penyediaan makanan dan minuman 12 laporan | 165.007.700,00 | Pemeriksaan ante mortem dan post mortem hewan yang dipotong di RPH 3500 ekor | 1.100.524.876,00 | Pemeriksaan ante mortem dan post mortem hewan yang dipotong di RPH 3500 ekor | 1.107.131.846,00 | Pemeriksaan ante mortem dan post mortem hewan yang dipotong di RPH 3500 ekor | 1.217.845.030,60 | Pemeriksaan ante mortem dan post mortem hewan yang dipotong di RPH 10500 ekor | 1.217.845.030,60 | DKPP | Kota Bandung |
| 3.2 7.0 4.2. 03 | Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Kesehatan Hewan Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Laporan Pengelolaan Pelayanan Jasa Kesehatan Hewan | n/a | Jumlah laporan bulanan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 laporan | 750.000.000,00 | Jumlah laporan bulanan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 laporan | 750.000.000,00 | Laporan Pengelolaan Pelayanan Jasa Kesehatan Hewan 1 laporan | 523.261.841,00 | Laporan Pengelolaan Pelayanan Jasa Kesehatan Hewan 1 laporan | 547.700.559,00 | Laporan Pengelolaan Pelayanan Jasa Kesehatan Hewan 1 laporan | 602.470.614,90 | Laporan Pengelolaan Pelayanan Jasa Kesehatan Hewan 3 laporan | 602.470.614,90 | DKPP | Kota Bandung |
| 3.2 7.0 4.2. 03. 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | - Jumlah pemeriksaan dan pengobatan kesehatan hewan - Penyediaan obat hewan - Penyediaan peralatan kesehatan hewan | n/a | Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran 12 | 267.000.000,00 | Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran 12 | 267.000.000,00 | - Jumlah pemeriksaan dan pengobatan kesehatan hewan 3000 ekor - Penyediaan obat hewan 2 paket - Penyediaan peralatan kesehatan hewan 1 paket | 523.261.841,00 | - Jumlah pemeriksaan dan pengobatan kesehatan hewan 3000 ekor - Penyediaan obat hewan 2 paket - Penyediaan peralatan kesehatan hewan 1 paket | 547.700.559,00 | - Jumlah pemeriksaan dan pengobatan kesehatan hewan 3000 ekor - Penyediaan obat hewan 2 paket - Penyediaan peralatan kesehatan hewan 1 paket | 602.470.614,90 | - Jumlah pemeriksaan dan pengobatan kesehatan hewan 9000 ekor - Penyediaan obat hewan 6 paket - Penyediaan peralatan kesehatan hewan 3 paket | 602.470.614,90 | DKPP | Kota Bandung |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|--|-----|--|-------------------|--|-------------------|--|----------------|--|----------------|----------------|---|----------------|------|--------------|--|--|
| | | | | peralatan kesehatan hewan | | laporan | | laporan | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pangan | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian dan Perikanan | 3.2 7.0 4.2. 04 | Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | - Laporan pengawasan unit usaha produk hewan - Laporan pendampingan pelaku usaha olahan hasil peternakan | n/a | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik 100% | 36.281.918.222,00 | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik 100% | 18.119.564.727,00 | - Laporan pengawasan unit usaha produk hewan 1 laporan - Laporan pendampingan pelaku usaha olahan hasil peternakan 1 laporan | 574.326.640,00 | - Laporan pengawasan unit usaha produk hewan 1 laporan - Laporan pendampingan pelaku usaha olahan hasil peternakan 1 laporan | 792.326.500,00 | 871.559.150,00 | - Laporan pengawasan unit usaha produk hewan 3 laporan - Laporan pendampingan pelaku usaha olahan hasil peternakan 3 laporan | 871.559.150,00 | DKPP | Kota Bandung | | |
| | | 3.2 7.0 4.2. 04. 01 | Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | - Pelatihan olahan hasil peternakan - Pelatihan kemasan - Sosialisasi ijin edar MD dan halal | n/a | Jumlah lokasi Pembangunan UPT Pembibitan Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan 1 lokasi | 33.700.252.655,00 | Jumlah lokasi Pembangunan UPT Pembibitan Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan 1 lokasi | 15.000.000.000,00 | - Pelatihan olahan hasil peternakan 10 kali - Pelatihan kemasan 8 kali - Sosialisasi ijin edar MD dan halal 1 kali | 93.894.490,00 | - Pelatihan olahan hasil peternakan 10 kali - Pelatihan kemasan 8 kali - Sosialisasi ijin edar MD dan halal 1 kali | 249.551.500,00 | 274.506.650,00 | - Pelatihan olahan hasil peternakan 30 kali - Pelatihan kemasan 24 kali dan halal 3 kali | 274.506.650,00 | DKPP | Kota Bandung | | |
| Meningkatnya Ketahanan Pangan | Terpenuhinya Keterseediaan Pangan yang Aman dan Sehat | 3.2 7.0 4.2. 04. 04 | Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | - Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil peternakan - Jumlah sampel pangan segar hasil peternakan yang diperiksa - Pemeriksaan sampel di laboratorium terakreditasi - Penyediaan sarana | n/a | Jumlah laporan pengadaan kendaraan dinas/operasional 12 laporan | 271.152.181,00 | Jumlah laporan pengadaan kendaraan dinas/operasional 12 laporan | 500.000.000,00 | - Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil peternakan 113 lokasi - Jumlah sampel pangan segar hasil peternakan yang diperiksa 2200 sampel - Pemeriksaan sampel di laboratorium terakreditasi 4 kali - Penyediaan sarana mini lab food security hasil peternakan 2 paket | 480.432.150,00 | - Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil peternakan 113 lokasi - Jumlah sampel pangan segar hasil peternakan yang diperiksa 2200 sampel - Pemeriksaan sampel di laboratorium terakreditasi 4 kali - Penyediaan sarana mini lab food security hasil peternakan 2 paket | 542.775.000,00 | 597.052.500,00 | - Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil peternakan 113 lokasi - Jumlah sampel pangan segar hasil peternakan yang diperiksa 6600 sampel - Pemeriksaan sampel di laboratorium terakreditasi 12 kali - Penyediaan sarana mini lab food security hasil peternakan 6 paket | 597.052.500,00 | DKPP | Kota Bandung | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|-----|---|------------------|---|------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|------------|--------------|
| | | | | mini lab food security hasil peternakan | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pangan | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian dan Perikanan | 3.2 7.0 5 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase Kejadian Bencana Pertanian Ditindaklanjuti | n/a | Jumlah laporan penyediaa n mebeulair 12 laporan | 177.292.521,00 | Jumlah laporan pengadaa n mebeulair 12 laporan | 195.021.773,00 | Persentase Kejadian Bencana Pertanian Ditindaklanjuti 100% | 563.197.720,00 | Persentase Kejadian Bencana Pertanian Ditindaklanjuti 100% | 326.931.840,00 | Persentase Kejadian Bencana Pertanian Ditindaklanjuti 100% | 359.625.024,00 | Persentase Kejadian Bencana Pertanian Ditindaklanjuti 100% | 359.625.024,00 | DISPANGTAN | DISPANGTAN |
| | | 3.2 7.0 5.2. 01 | Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Laporan pembinaan dan bimbingan penangan an pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim | n/a | Jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 laporan | 300.360.585,00 | Jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 laporan | 330.396.644,00 | Laporan pembinaan dan bimbingan penanganan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim 1 laporan | 563.197.720,00 | Laporan pembinaan dan bimbingan penanganan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim 1 laporan | 326.931.840,00 | Laporan pembinaan dan bimbingan penanganan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim 1 laporan | 359.625.024,00 | Laporan pembinaan dan bimbingan penanganan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim 3 laporan | 359.625.024,00 | DKPP | Kota Bandung |
| | | 3.2 7.0 5.2. 01. 02 | Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | - Pengadaan benih padi yang tahan bencana - Pengadaan benih sayuran yang terkena dampak bencana | n/a | Jumlah laporan bulanan Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara 12 laporan | 1.057.812.780,00 | Jumlah laporan bulanan Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara 12 laporan | 1.163.594.060,00 | - Pengadaan benih padi yang tahan bencana 16 lokasi - Pengadaan benih sayuran yang terkena dampak bencana 30 kecamatan | 43.200.000,00 | - Pengadaan benih padi yang tahan bencana 16 lokasi - Pengadaan benih sayuran yang terkena dampak bencana 30 kecamatan | 78.100.000,00 | - Pengadaan benih padi yang tahan bencana 16 lokasi - Pengadaan benih sayuran yang terkena dampak bencana 30 kecamatan | 85.910.000,00 | - Pengadaan benih padi yang tahan bencana 16 lokasi - Pengadaan benih sayuran yang terkena dampak bencana 30 kecamatan | 85.910.000,00 | DKPP | Kota Bandung |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|-----|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|------|--------------|
| | | 3.2 7.0 5.2. 01. 03 | Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | - Demplot - Penyediaan pupuk dan pestisida | n/a | Jumlah laporan pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor 12 laporan | 75.047.500,00 | Jumlah laporan bulanan pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor 12 laporan | 80.552.250,00 | - Demplot 6 lokasi - Penyediaan pupuk dan pestisida 1 paket | 377.355.220,00 | - Demplot 6 lokasi - Penyediaan pupuk dan pestisida 1 paket | 0,00 | - Demplot 6 lokasi - Penyediaan pupuk dan pestisida 1 paket | 0,00 | - Demplot 6 lokasi - Penyediaan pupuk dan pestisida 3 paket | 0,00 | DKPP | Kota Bandung |
| | | 3.2 7.0 5.2. 01. 01 | Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | - Pelatihan pembuatan agen hayati - Pengadaan pestisida - Sosialisasi penggunaan benih bersertifikat | n/a | Jumlah laporan gedung kantor yang direhabilitasi 12 laporan | 700.000.000,00 | Jumlah laporan gedung kantor yang direhabilitasi 12 laporan | 850.000.000,00 | - Pelatihan pembuatan agen hayati 2 kali - Pengadaan pestisida 9 jenis - Sosialisasi penggunaan benih bersertifikat 1 kali | 142.642.500,00 | - Pelatihan pembuatan agen hayati 2 kali - Pengadaan pestisida 9 jenis - Sosialisasi penggunaan benih bersertifikat 1 kali | 248.831.840,00 | - Pelatihan pembuatan agen hayati 2 kali - Pengadaan pestisida 9 jenis - Sosialisasi penggunaan benih bersertifikat 1 kali | 273.715.024,00 | - Pelatihan pembuatan agen hayati 6 kali - Pengadaan pestisida 9 jenis - Sosialisasi penggunaan benih bersertifikat 3 kali | 273.715.024,00 | DKPP | Kota Bandung |
| | | 3.2 7.0 7 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase Kelompok Tani Minimal Kategori Kelas Lanjut | n/a | Tingkat Disiplin Aparatur 100% | 107.525.000,00 | Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100% | 107.525.000,00 | Persentase Kelompok Tani Minimal Kategori Kelas Lanjut 10,80% | 553.126.070,00 | Persentase Kelompok Tani Minimal Kategori Kelas Lanjut 13,40% | 139.008.350,00 | Persentase Kelompok Tani Minimal Kategori Kelas Lanjut 15,90% | 152.909.185,00 | Persentase Kelompok Tani Minimal Kategori Kelas Lanjut 15,90% | 152.909.185,00 | DKPP | Kota Bandung |
| | | 3.2 7.0 7.2. 01 | Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Cakupan bina kelompok tani | n/a | Jumlah laporan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1 laporan | 107.525.000,00 | Jumlah laporan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1 laporan | 107.525.000,00 | Cakupan bina kelompok tani 100% | 553.126.070,00 | Cakupan bina kelompok tani 100% | 139.008.350,00 | Cakupan bina kelompok tani 100% | 152.909.185,00 | Cakupan bina kelompok tani 100% | 152.909.185,00 | DKPP | Kota Bandung |
| | | 3.2 7.0 7.2. 01. 01 | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | - Programa penyuluhan- Temu teknis | n/a | Persentase Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnyanya 75% | 215.050.000,00 | Persentase Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnyanya 76% | 179.069.371,00 | - Programa penyuluhan 1 kali- Temu teknis 7 kali | 5.989.170,00 | - Programa penyuluhan 1 kali- Temu teknis 7 kali | 17.265.000,00 | - Programa penyuluhan 1 kali- Temu teknis 7 kali | 18.991.500,00 | - Programa penyuluhan 3 kali- Temu teknis 21 kali | 18.991.500,00 | DKPP | Kota Bandung |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|---|-----|---|----------------|---|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|---|----------------|------|--------------|
| | | 3.2 7.0 7.2 01. 02 | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | - Demplot padi - Sekolah lapang tembakau - Temu tani tembakau | n/a | Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan kinerja aparatur 2 laporan | 215.050.000,00 | Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan kinerja aparatur 1 laporan | 179.069.371,00 | - Demplot padi 4 kelompok - Sekolah lapang tembakau 4 kelompok - Temu tani tembakau 7 kelompok | 505.668.000,00 | - Demplot padi 4 kelompok - Sekolah lapang tembakau 4 kelompok - Temu tani tembakau 7 kelompok | 50.951.500,00 | - Demplot padi 4 kelompok - Sekolah lapang tembakau 12 kelompok - Temu tani tembakau 21 kelompok | 56.046.650,00 | - Demplot padi 12 kelompok - Sekolah lapang tembakau 12 kelompok - Temu tani tembakau 21 kelompok | 56.046.650,00 | DKPP | Kota Bandung |
| | | 3.2 7.0 7.2 01. 03 | Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Penyediaan bibit/benih sayur, padi, pupuk, dan obat | n/a | Persentase Dokumen Kajian Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan Yang Ditindaklanjuti 100% | 399.930.900,00 | Persentase Dokumen Kajian Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan Yang Ditindaklanjuti 100% | 333.017.321,00 | Penyediaan bibit/benih sayur, padi, pupuk, dan obat 1 kali | 41.468.900,00 | Penyediaan bibit/benih sayur, padi, pupuk, dan obat 1 kali | 38.075.400,00 | Penyediaan bibit/benih sayur, padi, pupuk, dan obat 1 kali | 41.882.940,00 | Penyediaan bibit/benih sayur, padi, pupuk, dan obat 3 kali | 41.882.940,00 | DKPP | Kota Bandung |
| | | 3.2 7.0 7.2 01. 04 | Sub Kegiatan Pembentukan Badan Usaha Milik Petani | Temu usaha tani | n/a | Jumlah dokumen Kajian di bidang pangan, pertanian, dan perikanan 2 dokumen | 399.930.900,00 | Jumlah dokumen Kajian di bidang pangan, pertanian, dan perikanan 2 dokumen | 333.017.321,00 | Temu usaha tani 4 kelompok | 0,00 | Temu usaha tani 4 kelompok | 0,00 | Temu usaha tani 12 kelompok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DKPP | Kota Bandung |
| | | 3.2 7.0 7.2 01. 05 | Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Sekolah lapang | n/a | | | | | Sekolah lapang 4 kelompok | 0,00 | Sekolah lapang 4 kelompok | 32.716.450,00 | Sekolah lapang 12 kelompok | 35.988.095,00 | Sekolah lapang 12 kelompok | 35.988.095,00 | DKPP | Kota Bandung |
| | | 2.0 9.0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | n/a | | | | | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% | 26.831.722,178 | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% | 32.953.610,583 | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% | 36.248.971,641 | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% | 36.248.971,641 | DKPP | DKPP |
| | | 2.0 9.0 1.2 02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Peringkat Daerah | Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan | n/a | | | | | Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan 100% | 16.294.649,499 | Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan 100% | 20.282.233,338 | Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan 100% | 22.310.456,672 | Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan 100% | 22.310.456,672 | DKPP | DKPP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|-----|--|--|--|--|----------------|--|----------------|--|-------------------|--|-------------------|------|------|
| 2.0 9.0 1.2. 02. 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | n/a | | | | Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN 12 laporan | 16.294.649.499 | Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN 12 laporan | 20.282.233.338 | Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN 12 laporan | 22.310.456.671,80 | Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN 12 laporan | 22.310.456.671,80 | DKPP | DKPP |
| 2.0 9.0 1.2. 03 | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah | | | | | | | | 35.622.092 | Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah 100% | 39.184.301 | Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah 100% | 39.184.301 | DKPP | DKPP |
| 2.0 9.0 1.2. 03. 02 | Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah laporan pengamanan barang milik daerah | | | | | | | | 35.622.092 | Jumlah laporan pengamanan barang milik daerah 1 laporan | 39.184.301,20 | Jumlah laporan pengamanan barang milik daerah 3 laporan | 39.184.301,20 | DKPP | DKPP |
| 2.0 9.0 1.2. 02 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | n/a | | | | Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 100% | 90.200.000 | Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 100% | 127.338.750 | Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 100% | 140.072.625 | Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 100% | 140.072.625 | DKPP | DKPP |
| 2.0 9.0 1.2. 02. 01 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - Jumlah laporan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | n/a | | | | - Jumlah laporan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1 laporan | 90.200.000 | - Jumlah laporan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1 laporan | 127.338.750 | - Jumlah laporan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1 laporan | 140.072.625,00 | - Jumlah laporan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1 laporan | 140.072.625,00 | DKPP | DKPP |
| 2.0 9.0 1.2. 06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum | n/a | | | | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum 100% | 782.393.060 | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum 100% | 1.561.428.913 | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum 100% | 1.717.571.804 | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum 100% | 1.717.571.804 | DKPP | DKPP |
| 2.0 9.0 1.2. 06. 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah laporan bulanan penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan | n/a | | | | Jumlah laporan bulanan penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan 12 laporan | 79.946.130 | Jumlah laporan bulanan penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan 12 laporan | 66.843.240 | Jumlah laporan bulanan penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan 12 laporan | 73.527.564,00 | Jumlah laporan bulanan penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan 12 laporan | 73.527.564,00 | DKPP | DKPP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-----|--|--|--|---|-------------|---|-------------|---|--|---|--|--------------------|------|------|
| | | 2.0 9.0 1.2. 06. 06. 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Jumlah Laporan bulanan penyediaan alat tulis kantor - Jumlah Laporan bulanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | n/a | | | | - Jumlah Laporan bulanan penyediaan alat tulis kantor 12 laporan - Jumlah Laporan bulanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 laporan | 310.211.890 | - Jumlah Laporan bulanan penyediaan alat tulis kantor 12 laporan - Jumlah Laporan bulanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 laporan | 737.843.990 | - Jumlah Laporan bulanan penyediaan alat tulis kantor 12 laporan - Jumlah Laporan bulanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 laporan | 811.628.389 ,00 | - Jumlah Laporan bulanan penyediaan alat tulis kantor 12 laporan - Jumlah Laporan bulanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 laporan | 811.628.389 ,00 | DKPP | DKPP | |
| | | 2.0 9.0 1.2. 06. 06. 03 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan rumah tangga | n/a | | | | Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan rumah tangga 12 laporan | 57.907.630 | Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan rumah tangga 12 laporan | 98.444.830 | Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan rumah tangga 12 laporan | Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan rumah tangga 12 laporan | 108.289.313 ,00 | Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan rumah tangga 12 laporan | 108.289.313 ,00 | DKPP | DKPP |
| | | 2.0 9.0 1.2. 06. 06. 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah laporan bulanan penyediaan makanan dan minuman | n/a | | | | Jumlah laporan bulanan penyediaan makanan dan minuman 12 laporan | 95.229.200 | Jumlah laporan bulanan penyediaan makanan dan minuman 12 laporan | 167.652.430 | Jumlah laporan bulanan penyediaan makanan dan minuman 12 laporan | Jumlah laporan bulanan penyediaan makanan dan minuman 12 laporan | 184.417.673 ,00 | Jumlah laporan bulanan penyediaan makanan dan minuman 12 laporan | 184.417.673 ,00 | DKPP | DKPP |
| | | 2.0 9.0 1.2. 06. 06. 05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah laporan bulanan pengadaan cetakan dan penggandaan | n/a | | | | Jumlah laporan bulanan pengadaan cetakan dan penggandaan 12 laporan | 176.610.610 | Jumlah laporan bulanan pengadaan cetakan dan penggandaan 12 laporan | 221.563.260 | Jumlah laporan bulanan pengadaan cetakan dan penggandaan 12 laporan | Jumlah laporan bulanan pengadaan cetakan dan penggandaan 12 laporan | 243.719.586 ,00 | Jumlah laporan bulanan pengadaan cetakan dan penggandaan 12 laporan | 243.719.586 ,00 | DKPP | DKPP |
| | | 2.0 9.0 1.2. 06. 06. 06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah laporan bulanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan | n/a | | | | Jumlah laporan bulanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 12 laporan | 21.765.600 | Jumlah laporan bulanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 12 laporan | 21.885.600 | Jumlah laporan bulanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 12 laporan | Jumlah laporan bulanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 12 laporan | 24.074.160, 00 | Jumlah laporan bulanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 12 laporan | 24.074.160, 00 | DKPP | DKPP |
| | | 2.0 9.0 1.2. 06. 06. 09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan bulanan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | n/a | | | | Jumlah laporan bulanan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 laporan | 40.722.000 | Jumlah laporan bulanan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 laporan | 171.178.000 | Jumlah laporan bulanan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 laporan | Jumlah laporan bulanan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 laporan | 188.295.800 ,00 | Jumlah laporan bulanan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 laporan | 188.295.800 ,00 | DKPP | DKPP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|-----|--|--|--|---|---------------|---------------|---|--|------------------|---|------------------|------|------|
| 2.0 9.0 1.2. 06. 11 | Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah laporan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik | n/a | | | | Jumlah laporan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik 1laporan | | 76.017.563 | Jumlah laporan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik 1laporan | | 83.619.319,30 | Jumlah laporan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik 3 laporan | 83.619.319,30 | | |
| 2.0 9.0 1.2. 07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah tersedia | n/a | | | | Persentase Barang Milik Daerah tersedia 100% | 5.075.447.039 | 4.660.337.850 | Persentase Barang Milik Daerah tersedia 100% | | 5.126.371.635 | Persentase Barang Milik Daerah tersedia 100% | 5.126.371.635 | DKPP | DKPP |
| 2.0 9.0 1.2. 07. 05 | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | Jumlah laporan pengadaan mebel | n/a | | | | Jumlah laporan pengadaan mebel 12 laporan | 73.700.000 | 0 | Jumlah laporan pengadaan mebel 12 laporan | | 0 | Jumlah laporan pengadaan mebel 12 laporan | 0,00 | DKPP | DKPP |
| 2.0 9.0 1.2. 07. 10 | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah laporan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | n/a | | | | Jumlah laporan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya 12 laporan | 5.001.747.039 | 4.595.602.850 | Jumlah laporan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya 12 laporan | | 5.055.163.135,00 | Jumlah laporan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya 12 laporan | 5.055.163.135,00 | DKPP | DKPP |
| 2.0 9.0 1.2. 07. 11 | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah laporan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | n/a | | | | Jumlah laporan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya 1 laporan | 0 | 64.735.000 | Jumlah laporan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya 1 laporan | | 71.208.500,00 | Jumlah laporan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya 1 laporan | 71.208.500,00 | DKPP | DKPP |
| 2.0 9.0 1.2. 08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah Daerah tersedia | n/a | | | | Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah Daerah tersedia 100% | 2.536.538.400 | 2.861.466.800 | Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah Daerah tersedia 100% | | 3.147.613.480 | Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah Daerah tersedia 100% | 3.147.613.480 | DKPP | DKPP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|-----|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--------------------|------|------|
| | | 2.0 9.0 1.2. 08. 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan bulanan penyediaan n Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan atau Listrik | n/a | | | | Jumlah laporan bulanan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan atau Listrik 12 laporan | 763.988.400 | Jumlah laporan bulanan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan atau Listrik 12 laporan | 902.994.800 | Jumlah laporan bulanan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan atau Listrik 12 laporan | 993.294.280 ,00 | Jumlah laporan bulanan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan atau Listrik 12 laporan | 993.294.280 ,00 | DKPP | DKPP |
| | | 2.0 9.0 1.2. 08. 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - Jumlah Laporan bulanan penyediaan n jasa kebersihan kantor - Jumlah Laporan bulanan penyediaan n jasa jasa pengaman an kantor - Jumlah Laporan bulanan jasa pendukung g administra si perkantoran | n/a | | | - Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 laporan - Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa jasa pengamanan kantor 12 laporan - Jumlah Laporan bulanan jasa pendukung administrasi perkantoran 12 laporan | 1.772.550.0 00 | - Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 laporan - Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa jasa pengamanan kantor 12 laporan - Jumlah Laporan bulanan jasa pendukung administrasi perkantoran 12 laporan | 1.958.472.0 00 | - Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 laporan - Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa jasa pengamanan kantor 12 laporan - Jumlah Laporan bulanan jasa pendukung administrasi perkantoran 12 laporan | 2.154.319.2 00,00 | - Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 laporan - Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa jasa pengamanan kantor 12 laporan - Jumlah Laporan bulanan jasa pendukung administrasi perkantoran 12 laporan | 2.154.319.2 00,00 | DKPP | DKPP | |
| | | 2.0 9.0 1.2. 09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentas e Barang Milik Daerah terpelihar a | n/a | | | Persentase Barang Milik Daerah terpelihara 100% | 2.052.494.1 80 | Persentase Barang Milik Daerah terpelihara 100% | 3.425.182.8 40 | Persentase Barang Milik Daerah terpelihara 100% | 3.767.701.1 24 | Persentase Barang Milik Daerah terpelihara 100% | 3.767.701.1 24 | DKPP | DKPP | |
| | | 2.0 9.0 1.2. 09. 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Laporan bulanan penyediaan n jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Ope rasional | n/a | | | Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional 12 laporan | 487.680.600 | Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional 12 laporan | 501.142.400 | Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional 12 laporan | 551.256.640 ,00 | Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional 12 laporan | 551.256.640 ,00 | DKPP | DKPP | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|-----|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|-----------------------|------|-----------------------|--|-----------------------|--|--|
| | | 2.0 9.0 1.2. 09. 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah laporan kendaraan dinas/oprasional terpelihara 12 laporan | n/a | | | | Jumlah laporan kendaraan dinas/oprasional terpelihara 12 laporan | 774.610.980 | Jumlah laporan kendaraan dinas/oprasional terpelihara 12 laporan | 749.733.800 | Jumlah laporan kendaraan dinas/oprasional terpelihara 12 laporan | 824.707.180 ,00 | Jumlah laporan kendaraan dinas/oprasional terpelihara 12 laporan | 824.707.180 ,00 | DKPP | DKPP | | | | |
| | | 2.0 9.0 1.2. 09. 09 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - Jumlah laporan Gedung Kantor yang direhabilitasi - Jumlah laporan rutin/berkala gedung kantor terpelihara 12 laporan | n/a | | | - Jumlah laporan Gedung Kantor yang direhabilitasi 12 laporan - Jumlah laporan rutin/berkala gedung kantor terpelihara 12 laporan | 776.969.600 | - Jumlah laporan Gedung Kantor yang direhabilitasi 12 laporan - Jumlah laporan rutin/berkala gedung kantor terpelihara 12 laporan | 2.131.406.6 40 | - Jumlah laporan Gedung Kantor yang direhabilitasi 12 laporan - Jumlah laporan rutin/berkala gedung kantor terpelihara 12 laporan | 2.344.547.3 04,00 | - Jumlah laporan Gedung Kantor yang direhabilitasi 12 laporan - Jumlah laporan rutin/berkala gedung kantor terpelihara 12 laporan | 2.344.547.3 04,00 | DKPP | DKPP | | | | | |
| | | 2.0 9.0 1.2. 09. 11 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah laporan rutin/berkala peralatan gedung kantor terpelihara 12 laporan | n/a | | | Jumlah laporan rutin/berkala peralatan gedung kantor terpelihara 12 laporan | 13.233.000 | Jumlah laporan rutin/berkala peralatan gedung kantor terpelihara 12 laporan | 42.900.000 | Jumlah laporan rutin/berkala peralatan gedung kantor terpelihara 12 laporan | 47.190.000, 00 | Jumlah laporan rutin/berkala peralatan gedung kantor terpelihara 12 laporan | 47.190.000, 00 | DKPP | DKPP | | | | | |
| | | | | | | | | | 51.745.365. 991,00 | | 31.857.806. 541,00 | | | 42.225.922. 067,00 | | 47.387.663. 615,00 | | 52.126.429. 976,50 | | 52.126.429. 976,50 | | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri atas unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Renstra DKPP Tahun 2018-2023. Indikator kinerja perangkat daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Indikator kinerja perangkat daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja perangkat daerah berkenaan, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Selain indikator kinerja tujuan Renstra sebagai alat ukur pencapaian masing-masing misi, indikator sasaran Renstra juga merupakan instrument yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian visi dan misi. Melalui perubahan Renstra ini, maka dilakukan penyesuaian IKU untuk tahun 2021, 2022 dan 2023. Pertimbangan yang sangat mempengaruhi penentuan target yaitu kondisi tahun 2020. Pandemi *Covid-19* telah berdampak pada memburuknya berbagai kinerja pembangunan daerah yang ditunjukkan dengan berbagai indikator. Hal ini merupakan salah satu latar belakang dilakukannya perubahan RPJMD yang dilanjutkan dengan perubahan Renstra, yang diharapkan dapat memberikan pijakan yang realistis sesuai kondisi riil.

Penyesuaian kembali target dan indikator kinerja DKPP dilakukan menyusul kebijakan pemerintah Kota Bandung, pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat yang juga melakukan perubahan atau penyesuaian target indikator kinerja sebagai dampak pandemi *Covid-19*.

Capaian indikator kinerja DKPP dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi urusan bidang pangan, urusan bidang perikanan, dan urusan bidang pertanian. Sama halnya dengan IKU yang telah ditetapkan pada bagian sebelumnya, penentuan target indikator kinerja bidang urusan juga mengalami penyesuaian sebab adanya *Covid-19* yang menyebabkan berbagai sektor mengalami stagnasi bahkan mengalami penurunan kinerja

yang sangat drastis. Indikator kinerja penyelenggaraan urusan bidang pangan, pertanian, dan perikanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran perubahan RPJMD 2018 – 2023 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD 2018-2023

| No. | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|---------------------------------------|--|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| I. Indikator Kinerja Tujuan | | | | | | | | |
| I.1 | Skor Pola Pangan Harapan (angka) | N/A | N/A | 90,50 | 84,28 | 85,00 | 85,80 | 85,80 |
| I.2. | Cakupan Masyarakat Miskin yang Pangannya Tercukupi (%) | N/A | N/A | 0,98 | 1,31 | 1,63 | 1,96 | 1,96 |
| I.3. | Persentase Pelaku Usaha di Sektor Pertanian dan Perikanan Aktif (%) | N/A | N/A | N/A | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 80,00 |
| II. Indikator Kinerja Sasaran | | | | | | | | |
| II.1 | Skor Pola Pangan Harapan (angka) | N/A | N/A | 90,50 | 84,28 | 85,00 | 85,80 | 85,80 |
| II.2 | Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan (%) | N/A | N/A | 99,93 | 99,10 | 99,20 | 99,30 | 99,30 |
| II.3 | Cakupan Penanganan Kasus Penyakit Zoonosa (%) | N/A | N/A | N/A | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| II.4 | Cakupan Masyarakat Miskin yang Pangannya Tercukupi (%) | N/A | N/A | 0,98 | 1,31 | 1,63 | 1,96 | 1,96 |
| II.5 | Persentase Pelaku Usaha di Sektor Pertanian dan Perikanan Aktif (%) | N/A | N/A | N/A | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 80,00 |
| III. Indikator Kinerja Program | | | | | | | | |
| III.1 | Angka Kecukupan Energi (AKE) dengan ambang batas +/- 10% (kkal/kap/hari) | N/A | N/A | 2148,30 | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 |
| III.2 | Angka Kecukupan Protein (AKP) dengan ambang batas +/- 10% (gr/kap/hari) | N/A | N/A | 66,70 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
| III.3 | Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (%) | N/A | N/A | 99,93 | 99,10 | 99,20 | 99,30 | 99,30 |

| No. | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|--------|--|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| III.4 | Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Hasil Perikanan (%) | N/A | N/A | 99,93 | 99,10 | 99,20 | 99,30 | 99,30 |
| III.5 | Cakupan Penanganan Kasus Penyakit Zoonosa (%) | N/A | N/A | N/A | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| III.6 | Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Hasil Peternakan (%) | N/A | N/A | 99,93 | 99,10 | 99,20 | 99,30 | 99,30 |
| III.7 | Cakupan Masyarakat Miskin yang Pangannya Tercukupi (%) | N/A | N/A | 0,98 | 1,31 | 1,63 | 1,96 | 1,96 |
| III.8 | Cakupan Informasi Daerah Rentan Rawan Pangan (%) | N/A | N/A | N/A | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| III.9 | Persentase Binaan yang menjadi Pelaku Usaha Pangan Olahan Hasil Perikanan (%) | N/A | N/A | N/A | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 |
| III.10 | Persentase Binaan yang menjadi Pelaku Usaha Pangan Olahan Hasil Peternakan (%) | N/A | N/A | N/A | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 |
| III.11 | Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Perikanan (%) | N/A | N/A | N/A | 42,43 | 45,26 | 48,10 | 48,10 |
| III.12 | Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian dan Peternakan (%) | N/A | N/A | N/A | 65,00 | 75,00 | 85,00 | 85,00 |
| III.13 | Persentase Petani yang mengikuti Asuransi Usaha Tani Padi (%) | N/A | N/A | N/A | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 |
| III.14 | Persentase Kejadian Bencana Pertanian Ditindaklanjuti (%) | N/A | N/A | N/A | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| III.15 | Persentase Kelompok Tani minimal kategori Kelas Lanjut (%) | N/A | N/A | N/A | 10,80 | 13,40 | 15,90 | 15,90 |

Selain program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023, program dan kegiatan dilaksanakan juga untuk merealisasikan Janji Walikota dan Wakil Walikota Bandung tahun 2018-2023. Janji Walikota dan Wakil Walikota Bandung yang terkait dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yaitu, Subsidi harga sembako dan Kontribusi terhadap Co Working Space.

BAB VIII

PENUTUP

Dalam mengantisipasi perkembangan pada masa yang akan datang ditengah-tengah persaingan yang semakin tajam, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung bekerja keras untuk mempersiapkan diri dan secara terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan dengan melalui tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelanjutan serta berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang optimal.

Dalam Inpres No. 7 tahun 1999, terkandung bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1(satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Adapun Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung tahun 2018-2023 merupakan acuan bagi pembangunan pangan, pertanian, dan perikanan khususnya di Kota Bandung yang bersifat fleksibel dan dinamis sepanjang proses pembangunan pangan, pertanian dan perikanan sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Strategis ini, diharapkan akan terjadi sinkronisasi program antar Instansi/Lembaga terkait dalam Pembangunan sektor Pangan, Pertanian, dan Perikanan di Kota Bandung.

Bandung, 7 Desember 2021

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Bandung

Ir. GIN GIN GINAJAR, M.Eng
NIP. 196612091995031001



LAMPIRAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Bandung Tahun 2018-2023 (Sebelum Perubahan)

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|-----|--|--|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Peningkatan Ketahanan Pangan | Terpenuhinya Ketersediaan Pangan | Jumlah Cadangan Pangan Ekuivalen Beras (Ton) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | | Score Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Nilai) | 84.26 | 84.27 | 84.28 | 84.29 | 84.30 |
| 2. | Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar | Peningkatan Pangan Segar Yang Aman Dikonsumsi | Persentase Pangan Segar Yang Aman Dikonsumsi (%) | 91,00 | 92,00 | 93,00 | 94,00 | 95,00 |
| 3. | Peningkatan Hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan | Meningkatnya Produktivitas dan Produksi Hasil Pertanian, Peternakan, dan Perikanan | Produktivitas Padi (Kw/ha) | 68,08 | 68,22 | 68,36 | 68,50 | 68,64 |
| | | | Produksi Tanaman Sayuran (Pohon) | 237,000 | 278,400 | 287,936 | 297,621 | 308,270 |
| | | | Produksi Tanaman Hias (Pohon) | 155.485 | 161,864 | 168,489 | 175,369 | 182,763 |
| | | | Penanaman Pohon Buah-buahan (Pohon) | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 |
| | | | Populasi Ternak Domba (Ekor) | 36,756 | 37,829 | 38,437 | 39,158 | 39,849 |
| | | | Produksi Ikan Konsumsi (Ton) | 2,970 | 2,970.5 | 2,971 | 2,971.5 | 2,972 |
| | | | Produksi Ikan Hias (Ekor) | 1,222,000 | 1,272,000 | 1,322,000 | 1,372,000 | 1,422,000 |
| | | | Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/kapita/ tahun) | 37.95 | 37.97 | 37.99 | 38.00 | 38.02 |
| 4. | Terkendalinya Kasus Penyakit Zoonosa | Meningkatnya Penanganan Kasus Penyakit Zoonosa | Jumlah Maksimum Kasus Penyakit Zoonosa | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|-----|--|--|--|--|------|------|------|------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | (Kasus) | | | | | |
| 5. | Memberdayakan Masyarakat di Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan | Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Pertanian (Orang) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| | | | Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Peternakan (Orang) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| | | | Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Perikanan (Orang) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| | | | Jumlah Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan yang diberdayakan (Kelompok) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| 6. | Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Dinas | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| | | | Nilai Evaluasi AKIP (Angka) | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 |